

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

***THE FACTORS AFFECTING WILLINGNESS TO PAY TAXES,
TAXPAYER SMALL AND MEDIUM BUSINESS OWNERS***

SONIA DWI UTAMI

8335108427



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2014

ABSTRAK

SONIA DWI UTAMI. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah.*

Pembimbing: (1) Indra Pahala, SE, M.Si (2) Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak.

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemauan untuk membayar pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer, dengan memberikan kuesioner kepada responden yang memiliki usaha kecil dan menengah di Bandung yang terdaftar di LPDB melalui staf lapangan. Metode analisis data penelitian adalah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis linear berganda diolah menggunakan program SPSS 19.00.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis: (1) kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (2) pengetahuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (3) persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci: **Kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan**

ABSTRACT

SONIA DWI UTAMI. *The Factors Affecting Willingness to Pay Taxes Taxpayer Small and Medium Business Owners.State University of Jakarta.*

Guide by: (1) Indra Pahala, SE, M.Si (2) Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak.

Research. Accounting Major. Faculty of Economy. University of Jakarta. 2014

This study aims to analyze the factors that affect the willingness of taxpayers who have small and medium enterprises in meeting tax obligations. The study consisted of three independent variables and one dependent variable. independent variable in this study is the awareness that paying taxes , tax penalties knowledge, and a good perception of the effectiveness of the tax system. The dependent variable in this study is the willingness to pay taxes.

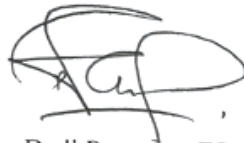
This study uses primary data, by giving questionnaires to respondents who have small and medium businesses in Bandung listed in LPDB through field staff. Methods of data analysis research are validity, reliability, test assumptions of classical, hypothesis testing and linear analysis is processed using SPSS 19:00.

Based on the analysis that has been carried out, this study shows that the hypotheses: (1) awareness of paying taxes affect the willingness to pay taxes, (2) knowledge of tax penalties to pay taxes have no effect on the willingness to pay taxes, (3) a good perception of the effectiveness of the tax system have an influence on the willingness to pay taxes.

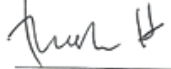




Keywords : Willingness to pay taxes , awareness to pay taxes , knowledge of tax penalties , a good perception of the effectiveness of the tax system

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi**



Drs. Dedi Purwana, ES., M.Bus
NIP. 19671207 19920 3 1001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak</u> <u>NIP. 19770617 200812 2 001</u>	Ketua	 _____	<u>18 Juni 2014</u>
<u>Ratna Anggraini ZR, SE, Akt, M.Si</u> <u>NIP. 19740417 200012 2 001</u>	Sekretaris	 _____	<u>17 Juni 2014</u>
<u>Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si</u> <u>NIP. 19760425 200112 2 002</u>	Penguji Ahli	 _____	<u>20 Juni 2014</u>
<u>Indra Pahala, SE, M.Si</u> <u>NIP. 19790208 200812 1 001</u>	Pembimbing I	 _____	<u>20 Juni 2014</u>
<u>Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak</u> <u>NIP. 19741105 200604 1 001</u>	Pembimbing II	 _____	<u>23 Juni 2014</u>

Tanggal Lulus : 12 Juni 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juni 2014

Yang membuat pernyataan,



Sonia Dwi Utami
8335108427

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena Ridha dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah”**. Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Keberhasilan penyelesaian penulisan proposal skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus , selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Indra Pahala, SE, M.Si , selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan dengan sabar dalam membimbing penulis.
3. Nuramalia Hasanah, SE.,M.Ak , selaku Ketua Pogram Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.
4. Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak , selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dengan sabar dalam membimbing penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah
6. Orang tua, kakak, adik dan seluruh keluarga besar tercinta, atas doa, bantuan, semangat, nasihat dan kerja keras tulus ikhlas dan tiada henti untuk penulis. Thanks to Allah SWT who has given me the best family ever.
7. Teman-teman sekolah penulis yang turut memberikan semangat, motivasi dan hiburan yang membuat penulis dapat semangat kembali
8. Teman-teman S1 Akuntansi Non Reguler 2010 yang selalu memberikan bantuan, semangat dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulisan ini
9. Pihak-pihak lain yang turut berperan dan membantu penulis dalam berjalannya penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, penulis memerlukan saran dan kritik yang dapat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan membutuhkan informasi tambahan.

Jakarta, Juni 2014

Sonia Dwi Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK INDONESIA	ii
ABSTRAK INGGRIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORITIK	13
A. Deskripsi Konseptual	13
1. Teori Atribusi (<i>attribution theory</i>)	13
2. Kemauan Membayar Pajak	14
3. Kesadaran Membayar Pajak	21
4. Pengetahuan Sanksi Perpajakan	27
5. Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan	33
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	45
C. Kerangka Teoritik	48
D. Perumusan Hipotesis	51
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Tujuan Penelitian	56
B. Objek dan Ruang lingkup penelitian	56

C. Metode Penelitian	57
D. Populasi dan Sampling	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	64
1. Statistik Deskriptif	64
2. Pengujian Kualitas Data	64
3. Uji Asumsi Klasik	66
4. Regresi Linear Berganda (<i>multiple regression</i>)	69
5. Uji Hipotesis	70
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Deskripsi Data	72
B. Pengujian Hipotesis	81
1. Pengujian Kualitas Data	81
2. Uji Asumsi Klasik	84
3. Regresi Linear Berganda	88
4. Uji Hipotesis	91
C. Pembahasan	96
BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Implikasi	106
C. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
RIWAYAT HIDUP	138

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat permohonan Observasi Penelitian Skripsi	116
Lampiran 2 Surat balasan Lembaga Pengelola Dana Bergulir	117
Lampiran 3 Kuesioner penelitian	118
Lampiran 4 Data Excel butir pernyataan	122
Lampiran 5 Output SPSS Uji Validitas	131
Lampiran 6 Output SPSS Uji Reliabilitas	135
Lampiran 7 P-Plots Uji Normalitas	136
Lampiran 8 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	137

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 R-APBN Penrimaan Dalam Negeri 2008-2011	2
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Skala Pengukuran	59
Tabel 3.2 Operational Variabel Penelitian	63
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner	73
Tabel 4.2 Isaac dan Michael	73
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	74
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	75
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Peredaran Omzet	75
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Bentuk Usaha	76
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	76
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir	77
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Pembayaran Pajak	77
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak	78
Tabel 4.12 Hasil Statistik Deskriptif	79
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas	82
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas	84
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas	85
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas	86

Tabel 4.17	Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
Tabel 4.18	Hasil Uji Autokorelasi	88
Tabel 4.19	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	89
Tabel 4.20	Koefisien determinasi (R ²)	91
Tabel 4.21	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	92
Tabel 4.22	Uji Signifikansi Simultann (Uji f)	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka berfikir	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bidang dalam akuntansi. Pajak bukan merupakan hal baru, hampir seluruh lapisan masyarakat diberbagai negara mengetahui pajak. Pajak merupakan pendapatan terbesar negara apabila disandingkan dengan sektor-sektor usaha lain seperti ekspor, impor, migas dll, hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran, pemasukkan, produksi barang/jasa di kenakan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan membuat penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sehingga hampir seluruh pembangunan sarana, prasarana dan alat-alat pendukung kinerja pemerintah di biyai oleh pendapatan yang berasal dari pajak. Peran serta masyarakat dalam membayar pajak sangat di harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Pada kenyatannya pajak yang dibayarkan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang mendukung kegiatan masyarakat, dan pemerintah. Penerimaan pajak mendominasi pendapatan Negara dari tahun ke tahun mengalahkan pendapatan negara bukan pajak.

Dalam tabel di bawah ini data APBN negara tahun 2008-2011:

Tabel 1.1
R-APBN Penerimaan Dalam Negeri 2008-2011
(triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2008	609,2	282,8
2009	725,8	258,9
2010	743.325,9	247.176,4
2011	850.255,5	250.907,0

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id (diakses 15 Maret 2014)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa ditahun 2008 hingga 2011 penerimaan negara lebih besar diterima dari sektor perpajakan dibanding sektor pendapatan negara bukan pajak. fenomena ini dapat terjadi dikarenakan pendapatan negara dari sektor pajak tidak tergantung pada pengolahan sumber daya alam seperti halnya migas. Penerimaan dari sektor pajak ditentukan oleh tingkat pembayaran pajak.

Sebagian besar masyarakat beranggapan membayar pajak merupakan beban yang senantiasa harus dihindari agar tidak mengurangi kekayaan (Marihot, 2010). Salah satu cara dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mencapai target penerimaan setiap tahun dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dengan memperluas subjek dan objek pajak atau meningkatkan jumlah wajib pajak dari segala lapisan masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak (Rohman, Zulaikha dkk, 2011). Salah satu kendala dalam penerimaan pajak adalah proses dari pemungutan pajak.

Dalam penerapannya pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan mudah, terdapat beberapa kendala yang timbul baik dari pihak internal (pegawai pajak) maupun dari pihak eksternal (wajib pajak), dalam hal ini bukan hanya peran aktif petugas perpajakan yang dibutuhkan tetapi adanya kemauan dari wajib pajak sendiri. Apabila tingkat kemauan membayar pajak tinggi tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya (Sutari dan Wardani, 2013). Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar atau tidak melaporkan kewajibannya.

Salah satu penyebab kurangnya kemauan tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan untuk membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kesadaran membayar pajak (Permadi, Nasir dan Yuneita, 2013). Selain itu pengetahuan dan pemahaman, norma moral, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan sanksi perpajakan juga mempengaruhi.

Kesadaran bernegara merupakan hal penting yang seharusnya sudah mulai dikenalkan sejak dini. Salah satu bentuk wujud kesadaran bernegara adalah dengan membayar pajak. Kesadaran bernegara kurang maka rasa

memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak tidak tebal (Marihot, 2010). Kesadaran membayar pajak yang sulit dibangun dikarenakan pengetahuan dan pemahaman pajak yang masih belum memadai. Peran aktif pemerintah menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan/sosialisasi rutin ataupun pelatihan secara intensif (Setyonugroho, 2012). Pengetahuan perpajakan sangat penting tidak hanya untuk generasi muda, pengusaha tetapi untuk seluruh masyarakat hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan.

Menggerakkan seseorang untuk melakukan kewajiban tidak mudah dan bukan hanya persoalan dari dalam diri, tetapi ada peranan lain dari luar yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kewajibannya. Dalam hal ini bisa dikatakan sanksi perpajakan sebagai salah satu pemacu individu untuk berlaku patuh memenuhi kewajibannya (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Umumnya individu akan mengikuti suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar wajib pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegaskan secara benar maka para wajib pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya (Amelia, 2013). Negara membutuhkan sebuah ketegasan agar tidak dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dibutuhkan sanksi perpajakan yang tegas dan tidak pilih-pilih (tidak hanya tegas pada masyarakat awam tetapi semua kalangan).

Banyaknya kasus penyelewengan pajak oleh aparat pajak dan wajib pajak yang memiliki kepentingan khusus seperti kasus Gayus Tambunan, PT Asian Agri Group, PT *The Master Steel* dll (liputan6.com), menimbulkan kesangsian atas penegakan hukum yang masih dirasa lemah. Pemerintah harus bekerja keras memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan hukum agar tidak terulang kembali kasus serupa sehingga tidak menimbulkan citra yang buruk. Dengan adanya ketegasan dan kekuatan hukum masyarakat yang pada awalnya tidak peduli terhadap pajak akan perlahan tergerak untuk memenuhi kewajibannya, bukan hanya dalam hal penegakkan hukum yang harus terus diperhatikan pemerintah namun juga dalam hal sosialisasi atau penyuluhan atas peraturan tersebut. Negara ini memiliki jutaan penduduk dengan tingkat pendidikan yang beragam dan sumber penghasilan dari jenis pekerja yang berbeda pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih agar tidak ada lagi terjadi pelanggaran dan mengakibatkan permasalahan baru, salah satu yang menjadi perhatian dalam hal ini pemilik usaha kecil dan menengah.

Usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai salah satu bagian terpenting dalam perekonomian di suatu wilayah maupun Negara khususnya di Indonesia. UKM mengambil peran aktif dalam perekonomian Indonesia. Pada saat krisis ekonomi melanda sekitar tahun 1997, UKM tetap bertahan bahkan perannya semakin meningkat dan

terlihat sangat jelas dalam perekonomian (SME & SR media). Pada saat itu bentuk usaha inilah yang paling cepat pulih dari krisis ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha skala besar yang banyak terpuruk pada saat itu.

UKM memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dan dalam mengatasi kemiskinan karena lapangan pekerjaan bertambah mengatasi masalah tingkat pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia, dan meningkatkan pendapatan perkapita Negara. Saat ini jumlah warung, toko, mini market, atau usaha industry rumahan (*Home Industry*) di Indonesia sudah semakin bertambah dan jenis barang yang diproduksi semakin beragam. Hal ini menunjukkan bahwa usaha UKM menjadi sektor usaha yang paling di minati masyarakat, dan menjadi penyelamat bagi perekonomian Negara.

Jumlah UMKM atau UKM di Indonesia cukup meyakinkan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia, pada 2014 angka ini diperkirakan akan bertambah menjadi 58 juta unit. UKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), kini mencapai Rp 8.200 triliun (kompas.com).

Wajib pajak pengusaha UMKM tidak dikecualikan juga memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban

perpajakannya. Tetapi dalam perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Apabila menggunakan data UMKM tahun 2009 sebagai pendekatan pelaku usaha dengan omzet dibawah Rp4,8 miliar, ternyata kontribusi pajak sektor UMKM baru mencapai 0,5% dari total penerimaan pajak tahun 2009 sebesar Rp 544,5 triliun. Sedangkan porsi PDB sektor UMKM mencapai 56% lebih dari total PDB tahun 2009 yang mencapai RP 5.295 triliun (Budi, 2013).

Penerimaan pajak sektor UMKM yang masih rendah, di duga karena banyak pengusaha yang belum secara resmi mendaftarkan usahanya dan belum menjadi wajib pajak aktif. Berdasarkan data BPS 2009, jumlah UMKM Indonesia sebanyak 24.096.816 unit, pada tahun 2010 meningkat 54.114.821 namun yang terdaftar memiliki NPWP hanya sebesar 217.248 unit. Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang sebisa mungkin harus dihindari. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan (Fuadi dan Mangoting, 2013). Akan

tetapi kebijakan yang diterapkan pemerintah terkadang tidak langsung dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah, persepsi masyarakat nantinya akan mempengaruhi isi dari kebijakan yang akan diterapkan nantinya.

Persepsi merupakan tanggapan atau anggapan yang muncul atas pemikiran yang muncul pada saat mengamati sebuah objek hidup atau tidak bergerak. Sejak 1983 Indonesia mulai menerapkan sistem penerapan berbasis *self assessment*, dimana sistem ini menggantikan *official assessment*. *Self assessment* merupakan suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangya (Harahap, 2004) dalam (Setyonugroho, 2012). dituntut aktif dan jujur dalam memenuhi kewajiban pajaknya sendiri.

Perhitungan pajak yang berbasis manual sering kali menyusahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga banyak wajib pajak terkadang sengaja tidak membayarnya, untuk mencegah kerugian yang semakin besar pemerintah termotivasi untuk membuat inovasi dalam sistem perpajakan yang diharapkan dapat memberi kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya Cummings dan Vasquez (2005).

Permadi, Nazir dan Yuneita (2013), masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui bahwa pemerintah sudah menyediakan system *e-SPT*, *e-Banking*, *e-Filling* dan *e-Register* yang memberikan kemudahan tanpa harus mendatangi KPP, dan terdapat wajib pajak yang sudah mengetahui namun belum percaya dengan system perpajakan berbasis *online* karena belum memberikan pelayanan yang memuaskan.

Kebijakan pemerintah dengan adanya pembaharuan system perpajakan merupakan suatu bentuk usaha membuktikan bahwa pemerintah terus berusaha untuk memberikan kemudahan, kenyamanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Partipasi wajib pajak sangat berpengaruh keberlangsungan seluruh kegiatan pemerintah. Apabila masyarakat menunjukkan sikap yang baik terhadap program pemerintah maka dapat diperkirakan penerimaan pajak setiap tahun akan meningkat, dan pendapatan Negara dari sektor pajak pun akan bertambah, dengan syarat dari kedua pihak baik oknum pajak maupun wajib pajak tidak melakukan tindak kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak khususnya pemerintah.

Sehubungan dengan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut “**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka berikut identifikasi masalah dalam penelitian:

- 1) Penerimaan pajak terhambat akibat kendala proses pemungutan pajak yang sulit
- 2) Pemungutan pajak tersendat rendahnya kemauan masyarakat untuk membayar pajak
- 3) Kemauan membayar pajak rendah karena adanya asas perpajakan bahwa wajib pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung
- 4) Kurangnya kesadaran bernegara membuat kesadaran membayar pajak tidak terbangun
- 5) Sanksi perpajakan masih di anggap lemah karena masih adanya pelanggaran pajak
- 6) UKM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Negara yang potensi pajaknya belum termaksimalkan
- 7) Persepsi wajib pajak bahwa system perpajakan *online* belum dapat memberikan kepuasan pelayanan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah.**

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

- 1) Apakah Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik usaha Kecil dan Menengah?
- 2) Apakah Pengetahuan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik usaha Kecil dan Menengah?
- 3) Apakah Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik usaha Kecil dan Menengah?
- 4) Apakah Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan Sanksi Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait, berupa:

- 1) Informasi dan wawasan baru yang belum pernah di peroleh sebelumnya sebagai tambahan pengetahuan secara teoritis maupun

pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi baru untuk pelaksanaan praktiknya secara nyata.

- 2) Pemecahan permasalahan ataupun solusi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak khususnya perpajakan dalam penyelesaian permasalahan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Memberikan gambaran bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama, dan sebagai referensi penulisan

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori hubungan (*attribution theory*)

Teori hubungan (*attribution theory*) teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, seseorang berusaha untuk mengembangkan berbagai penjelasan tentang mengapa individu berperilaku dalam cara-cara tertentu. Terdapat upaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara *internal* adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan, perilaku secara eksternal, dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar: adanya paksaan terhadap individu untuk berperilaku demikian oleh situasi (Robbins, 2008: 177). Penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor:

- a. kekhususan, merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda
- b. konsensus, apabila semua individu menghadapi situasi yang sama merespons dalam cara yang sama
- c. konsistensi, melihat cara individu tersebut selalu merespons dengan menggunakan cara yang sama

Alasan memilih teori ini karena dapat dikatakan berkaitan dengan variabel dependen kemauan membayar pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. Kemauan Membayar Pajak

2.1 Kemauan

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adaya pemaparan mengenai apa yang akan diteliti hal tersebut memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti. Sebelum membicarakan permasalahan secara menyeluruh perlu diketahui terlebih dahulu mengenai variabel inti atau terikat pengertian kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*).

Terdapat berbagai definisi mengenai kemauan membayar pajak. Beberapa definisi diantaranya sebagai berikut: dalam kamus besar bahasa Indonesia kemauan diartikan sebagai rasa yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu, contoh dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Secara psikologi menurut (Abu, 2003: 113), kemauan merupakan salah satu fungsi hidup dalam kejiwaan manusia, yang dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Menurut Kartono (1996: 104), kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan

hidup tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Kemauan menjadi *unifikator* atau pemersatu dari semua tingkah laku manusia, dan mengkoordinasikannya. Kemauan yang sehat menjadikan manusia satu kesatuan yang betul-betul menyadari tujuan hidupnya. Rantung dan Adi (2009), kemauan adalah kekuatan yang timbul atas rasa sadar dan hidup dan atau menciptakan sesuatu yang berdasarkan perasaan dan pikiran. Kemauan adalah aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan yang menjadi titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah (Sumanto, 2014: 153). Kemauan dikelompokkan menjadi: dorongan keinginan, hasrat, kecenderungan, hawa nafsu, dan kemauan. Dorongan pada tingkat psikologis adalah kemauan. Ciri-ciri kemauan menurut Sumanto:

- a. Kemauan merupakan dorongan dari dalam yang disadari, dan dipertimbangkan
- b. Kemauan berhubungan erat dengan suatu tujuan dan mendorong timbulnya gerak/aktivitas kearah tercapainya suatu tujuan
- c. Kemauan mendorong timbulnya perbuatan didasarkan atas beberapa pertimbangan
- d. Kemauan tidak hanya didukung pertimbangan pikir dan perasaan tetapi seluruh pribadi memberikan corak pada perbuatan kemauan
- e. Di dalam gejala kemauan terkandung sifat aktif karena timbulnya suatu dorongan sekaligus timbulnya tujuan yang dipandang berguna

Menurut (Sumanto, 2014: 157) Kemauan bersumber pada dorongan yang menimbulkan aktivitas mengarah pada tercapainya tujuan mengikuti proses tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Adanya motif (alasan, pendorong), motif digolongkan menjadi dua yaitu: motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir tanpa dipelajari, dan motif yang dapat dipelajari berasal dari lingkungan.
- b. Mempertimbangkan motif-motif, sebelum mengambil keputusan individu terjadi proses perjuangan motif
- c. Memutuskan, ketika seseorang membuat keputusan, harus memilih satu kemungkinan dan meninggalkan kemungkinan yang lain
- d. Melaksanakan keputusan kemauan, langkah terakhir bertindak sesuai dengan keputusan

Dari definisi diatas dapat disimpulkan secara psikologi kemauan dapat diartikan sebagai adanya rasa, dorongan, dan aktifitas yang terjadi didalam diri seseorang sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif melalui pertimbangan akal budi mempersatukan semua tingkah laku untuk melakukan dan mencapai tujuan tertentu yang menjadi titik akhir individu.

2.2 Kemauan Membayar Pajak

Menurut Setyonugroho (2012), kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan

dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara. Menurut *Frey dan Torgle (2007)*, *Whereby the individual's willingness to evade/pay taxes in part also depends on whether they perceives other society members comply with their tax obligation or not*. Dimana keinginan individu untuk menghindari atau membayar pajak sebagian tergantung pada apakah individu tersebut merasakan anggota lain masyarakat memenuhi kewajiban mereka atau tidak. Menurut *Rantung dan Adi (2009)*, Kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu:

1. Konsep kemauan membayar;
 - a. merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (*Widaningrum, 2007*).
 - b. Menurut *Wertenbroch dan Skiera (2002)*, *Willingness to pay is defined as the maximum price a buyer accepts to pay for a given number of goods and services*. Kemauan untuk membayar didefinisikan sebagai harga maksimum yang diterima oleh pembeli untuk membayar untuk sejumlah nilai dari barang dan jasa.
2. Konsep pajak, *Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011)* pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan

untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Rantung dan Adi (2009) Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Dari definisi di atas kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk kerelaan dari individu untuk memberikan sejumlah untuk kepentingan bersama tanpa timbal balik secara langsung yang akan diterima, kemauan membayar pajak juga dapat terwujud atau tidak dilakukan ketika wajib pajak melihat perilaku wajib pajak lain membayarkan pajak pajaknya dan menerima keuntungan atau menghindarinya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, adalah:

1. Administrasi perpajakan suatu Negara, administrasi yang baik akan menimbulkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pelayanan pada wajib pajak, dengan sumber daya aparat dan prosedur perpajakan yang baik maka usaha untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik.

3. Penegakkan hukum perpajakan, wajib pajak akan patuh (karena tekanan UU) karena adanya sanksi berat dan tegas.
4. Pemeriksaan pajak.
5. Tarif pajak, yang rendah mengakibatkan penerimaan pajak menjadi rendah.

Kelman (1966) dalam MARIHOT (2010: 106) menyatakan terdapat tiga perilaku orang mau membayar pajak:

1. *Compliance attitude*, suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Apabila peraturan yang mengatur lemah, kurang pengawasan, dan ketegasan pemerintah maka akan terjadi usaha menyembunyikan, menyelundupkan atau tidak membayar pajak.
2. *Identification attitude*, suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena didorong oleh rasa senang dan hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak, perilaku ini akan berubah apabila petugas yang dijadikan pedoman tidak menunjukkan kinerja yang baik, kemauan masyarakat akan menurun.
3. *Internalization attitude*, merupakan suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas. Pembayaran pajak didasarkan atas dorongan dalam diri menyadari fungsi dan kegunaan pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), kemauan membayar pajak diukur dengan beberapa indikator-indikator, yaitu:

1. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
2. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
3. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
4. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Dari analisis teori diatas, kemauan membayar pajak merupakan rasa yang timbul dari dalam diri untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu atas suatu pemikiran, adanya sebuah kerelaan atau pengorbanan untuk pencapaian tersebut, kemauan tidak akan terealisasikan tanpa adanya suatu pergerakan atau perbuatan yang dilakukan, perbuatan muncul dengan adanya kesadaran bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan sebuah usaha dan pengorbanan. Dengan adanya kesadaran maka akan mendorong kemauan untuk bertindak.

3. Kesadaran membayar pajak

3.1 Kesadaran

Kesadaran merupakan unsur dari diri manusia yang digunakan dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak

memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar (Pratiwi dan Setiawan, 2014). Akdoğan (2009) *wistfulness of taxpayers, aware of tax in realizing public services, for fulfilling their liabilities regarding tax*. Keprihatinan dari wajib pajak, sadar pajak dalam mewujudkan pelayanan publik, untuk memenuhi kewajiban mereka mengenai pajak (Yildirim dan Comakli, 2013). Taraf kesadaran akan meningkat apabila aktivitas jiwa dalam memberikan reaksi terhadap objek meningkat (Sumanto, 2014).

3.2 Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Fikriningrum (2012), Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan, melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama (Permadi, Nasir, dan Anisma, 2013). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik (Muliari dan Setiawan, 2011). Menurut Marihot (2010), kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintahan mencapai tujuan negara dalam hal perpajakan untuk kepentingan masyarakat. *Tax morality* atau moralita (kesadaran secara sungguh-

sungguh) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran bernegara. Kesadaran mempengaruhi tingkat kemauan membayar pajak, masyarakat akan mau membayar pajak secara sukarela karena sudah mengetahui bahwa hasil dari pajak yang dibayarkannya akan digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya mengayomi masyarakat, yang berarti pemerintah juga akan memperoleh manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan.

Ömürbek, H. G. Çiçek, & S. Çiçek (2007) dan (Yildirim dan Comakli, 2013) , factors affecting tax consciousness are analyzed, and it is examined to what extent taxpayers are aware of the paid taxes and under which circumstances the tax consciousness increases. Conclusions of the study state that:

1. Taxpayers are aware of taxes they pay;
2. Tax consciousness increases as the educational level increases; and
3. Increasing income level also increases the tax consciousness

Faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak dianalisis, dan diuji apa pembayar pajak sejauh sadar akan pajak yang dibayar dan di mana situasi pajak kesadaran meningkat. Kesimpulan dari studi negara bahwa:

1. Wajib Pajak sadar pajak yang mereka bayarkan;
2. Kesadaran pajak meningkat dengan meningkatnya tingkat pendidikan
3. Meningkatkan tingkat pendapatan juga meningkatkan kesadaran pajak

Menurut Suryadi (2006), terdapat empat faktor penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak:

1. menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajaknya
2. mempelajari karakteristik wajib pajak
3. meningkatkan pengetahuan perpajakan
4. penyuluhan wajib pajak

Menurut Tiradaa (2013), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan DirJen Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak , antara lain:

1. Melakukan sosialisasi, kesadaran membayar pajak datangya dari dalam diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan terdekat, dengan tingginya insensitas informasi yang diterima maka dapat secara perlahan merubah *mindset* tentang pajak ke arah positif
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak
3. Meningkatkan citra *Good Governance*, adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan, diharapkan dapat mendorong individu kearah

positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang selanjutnya dapat memberikan pengaruh positif untuk membayar pajak

5. *Law enforcement*
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak
7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional

Marihot (2010:104) menjelaskan, kesadaran membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan. Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan/sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan (Setyonugroho, 2012).

Menurut Robbins (2008: 74), individu dapat belajar melalui pengamatan maupun pengalaman langsung yang disebut dengan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi, keberadaan pembelajaran melalui pengamatan. Proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian, individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur-fitur pentingnya.

2. Proses penyimpanan, pengaruh sebuah model akan bergantung pada seberapa baik individu mengingat tindakan model setelah model tersebut tidak lagi tersedia
3. Proses reproduksi motorik, proses ini menunjukkan individu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model
4. Proses penegasan, individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia insentif positif atau penghargaan.

Irianto (2005), Tatiana dan Priyo (2009: 8), terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. dibawah ini dijelaskan tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran:

1. kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dengan adanya hal ini wajib pajak tidak mersa dirugikan telah membayar pajak.
2. kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber *financial* dan menghambat pembangunan negara.
3. kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

Fallan (1999) dalam Siti Rahayu (2010), pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran bernegara yang rendah maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, dan akibatnya rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga berkurang sehingga kesadaran semakin berkurang karena tidak adanya timbal balik yang didapat (Marihhot, 2010: 106).

Dari analisis teori diatas, kesadaran membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah sebagai bentuk kesadaran bernegara, merupakan bentuk pehaman dan pengetahuan bahwa pada dasarnya pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warganegara, kurangnya kesadaran membayar pajak membawa dampak yang merugikan negara, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat mempengaruhi sikap kepada sistem perpajakan. kesadaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh teknis perpajakan tetapi kemauan untuk mematuhi peraturan.

4. Pengetahuan Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Suandy (2011: 165) dan Mardiasmo (2011: 59). Dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak akan berfikir ulang untuk mencoba melakukan pelanggaran pajak, karena justru akan semakin memberatkan pembayarannya karena ditambah dengan denda atau sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya menurut Tjahjono (2005: 362), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak (Arum dan Zulaikha, 2012).

Definisi teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang terdapat dalam peraturan perpajakan, sanksi pajak sebagai dasar hukum untuk mengawasi atau mencegah kegiatan perpajakan seluruh warganegara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak agar tetap berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah, semakin besar kesalahan semakin berat sanksi yang diberikan.

Dalam undang-undang perpajakan sanksi perpajakan dikenal menjadi dua macam sanksi, yaitu: Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi: bunga, denda, dan kenaikan tarif, dan sanksi pidana terdiri dari tiga jenis: kurungan, penjara, dan denda. Menurut Devano dan Rahayu (2006: 198), sanksi administrasi adalah sanksi yang dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan:

1. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak
2. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi administrasi berupa sanksi bunga, denda, dan kenaikan tarif yang akan diberikan atas pelanggaran yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Sanksi bunga 2% per bulan, dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan:

- a. Bunga pembayaran dikenakan karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan, dikarenakan:
 - 1) pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau masa) tetapi belum diperiksa,
 - 2) angsuran/penundaan pembayaran,
 - 3) terlambat membayar,
 - 4) adanya kurang bayar, SPT salah tulis atau salah hitung
 - b. Bunga penagihan, bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran
 - c. Bunga ketetapan, bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
2. Sanksi denda, jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Untuk denda tidak menyampaikan atau terlambat memasukan atau menyampaikan SPT dikenakan denda Rp 500,000 untuk SPT masa PPN, Rp 100,000 untuk SPT Masa, Rp 1,000,000 SPT tahunan Badan

3. Sanksi kenaikan, kenaikan 50% dan 100% merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang bayar.

Menurut Suandy (2011) berdasarkan undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan penjara:

1. Denda pidana, denda pidana dikenakan kepada wajib pajak, pejabat dan pihak ketiga yang melanggar norma, atas tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan
2. Pidana kurungan, hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditujukan kepada wajib pajak atau orang ketiga
3. Pidana penjara, sama halnya dengan pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan wajib pajak.

Dalam Marihot (2010: 228) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait dengan siapa yang berhak menjatuhkan sanksi:

- a. Sanksi administrasi, pada dasarnya merupakan sanksi yang dikenakan sendiri oleh fiskus dan biasanya berupa suatu tambahan atas pajak yang harus dibayar.

- b. Sanksi pidana, yang menjatuhkan hukuman bukan fiskus melainkan hakim setelah melalui proses persidangan.

Burton dan Wirawan (2001: 66) menjelaskan dalam UU KUP ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 membedakan adanya sifat pidana yang bisa dilakukan yaitu sifat kealpaan dan sifat kesengajaan:

1. Setiap orang yang karena kealpaannya:
 - a. Tidak menyampaikan SPT: atau
 - b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1(satu) tahun. (Pasal 38 UU KUP 2007)

Berdasarkan UU RI nomor 16 tahun 2009 UU KUP Pasal 39 ayat (1).

2. Setiap orang dengan sengaja
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP

- c. Tidak menyampaikan SPT; menyampaikan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Dari analisis teori diatas, teori sanksi pajak memiliki persamaan sebagai pencegah terjadinya pelanggaran dalam perpajakan dan mengikat wajib pajak agar mengikuti terhadap peraturan yang ditetapkan apabila tidak ingin terkena hukuman. Tingkat kepatuhan masyarakat mendorong kemauan membayar pajaknya, karena takut akan terkena hukuman.

5. Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

5.1 Persepsi

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas *integrated* (menyatupadukan) dalam diri individu tersebut (Widayati, 2010: 6). Secara psikologi persepsi dinyatakan sebagai sebuah pengamatan secara global atau keseluruhan, yang belum disertai kesadaran, subyek dan obyek belum terbedakan (proses memiliki tanggapan) Kartono (1996).

Sedangkan menurut Gibson (1994: 53) persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seseorang, setiap individu memberi arti kepada stimulus (rangsangan), maka setiap individu akan melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Persepsi (*perception*) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif (Robbins, 2008: 175). Persepsi merupakan proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus, stimulus didapat dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Sumanto, 2014: 52). Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah

terpercaya, handal, dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan atau penilaian yang positif (Nugroho dan Zulaikha, 2012: 4).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan bentuk pengamatan atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek baik benda ataupun makhluk hidup yang dipengaruhi oleh perhatian terhadap objek tersebut, pengaruh tempat, waktu, dan suasana terhadap sebuah hasil penilaian individu tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi (Robbins, 2008: 176), antara lain:

1. Perhatian, karena perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran, pada saat stimulus lainnya melemah. Dalam stimulus mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain intensitas dan pengulangan. Diri orang yang membentuk persepsi itu sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap kepentingan, minat, kebutuhan, pengalaman, harapan dan kepribadian.
2. Stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu, berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.
3. Faktor situasi dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, suasana dan lain-lain.

Persepsi memiliki beberapa prinsip yang sebagian besar merupakan prinsip pengorganisasian berdasarkan teori Gestalt:

1. Prinsip persepsi bentuk utama (*figure*) dan *ground* (latar)

Menggambarkan bahwa manusia secara sengaja maupun tidak memilih dari serangkaian stimulus, mana yang menjadi fokus atau bentuk utama dan mana yang menjadi latar. Artinya individu hanya akan menjadikan informasi tertentu sebagai bentuk utama dan informasi lainnya menjadi latar.

2. Prinsip pengorganisasian persepsi

Mempersepsi stimulus mana yang akan menjadi bentuk utama dan mana yang menjadi latar, ada beberapa prinsip pengorganisasian:

- a. Prinsip kedekatan, seseorang cenderung mempersepsi stimulus-stimulus yang berdekatan sebagai suatu kelompok
- b. Prinsip kesamaan, seseorang cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai satu kesatuan
- c. Prinsip kelanjutan, menunjukkan bahwa pikiran seseorang secara alamiah melakukan proses melengkapi informasi yang diterima walaupun stimulus tidak lengkap
- d. Prinsip kesimetrisan, kecenderungan seseorang mengorganisasikan berbagai hal dalam bentuk simetri
- e. Prinsip kerapatan, kecenderungan untuk mempersepsi dengan mengisi bagian-bagian yang kosong dalam suatu bentuk

5.2 Efektivitas

Dalam Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 130), mengartikan efektivitas sebagai suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai. Menurut Kartikahadi, efektivitas dimaksudkan bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan (Agoes, 2012). Barnard menyatakan efektivitas sebagai suatu bentuk pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas (Gibson, 1994: 27).

Efektivitas dinyatakan sebagai bentuk perbandingan masukan keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapain tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas hasil kerja, kualitas kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan (Agoes, 2012). Menurut Cook dan Winkle *Effectivity, if the achieved benefits are in accordance with the program's preestablished goals*. Efektivitas, jika manfaat yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum program (Agoes, 2012: 168). Mardiasmo menjelaskan efektivitas digunakan sebagai pengukur keberhasilan dari hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang ditetapkan (Indrakusuma, 2011).

Rob Reider menjelaskan pengertian *effectiveness* sebagai pencapaian hasil atau manfaat organisasi yang didasarkan pada sasaran dan tujuan atau beberapa kriteria lain yang dapat diukur, meliputi :

- a. Penilaian sistem perencanaan organisasi agar pencapaian sasaran, tujuan, dan rencana terperinci
- b. Penilaian kecukupan sistem manajemen dalam mengukur efektivitas
- c. Menentukan keluasan hasil yang ingin dicapai
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor hasil kinerja yang memuaskan

Dari definisi diatas efektivitas dapat diartikan sebagai hasil akhir atau pencapaian dari sebuah proses untuk mencapai tujuan dengan dilihat dari besarnya hasil atau pencapaian, kualitas pencapaian atau hasil dan waktu yang digunakan dari dimulainya proses awal hingga mendapatkan hasil akhir.

5.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yakni *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*, ketiga unsur tersebut saling menjang satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan, ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan stabil karena sebagai penentu berjalannya sistem perpajakan di suatu negara yang baik. Sistem perpajakan diartikan sebagai suatu kumpulan atas satu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan

penerimaan pajak bagi Negara secara optimal (Devano dan Rahayu, 2006: 67). Sistem perpajakan dapat disebut juga sebagai metode pengelolaan pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat wajib pajak maupun fiskus, dengan disertai berbagai kebijakan pemerintah untuk tujuan tertentu, sebagai kerangka untuk membangun administrasi pajak yang efektif sebagai pelaksana teknis dari sistem perpajakan yang dipilih (Devano dan Rahayu, 2006: 74). Efektivitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan kinerja yang diharapkan dari sistem perpajakan yang terdiri dari suatu kumpulan unsur perpajakan untuk mencapai target meningkatkan penerimaan pajak dengan tidak membebankan, adil, dan memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sistem perpajakan dikatakan efektif jika sistem yang diterapkan tidak mempersulit wajib pajak.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa sistem perpajakan merupakan satu kesatuan unsur perpajakan terdiri dari *policy*, *law* dan *administration* perpajakan yang tidak dapat dipecah belah karena saling keterkaitan yang dibuat oleh negara diperuntukan seluruh wajib pajak dan dijalani bersama untuk mencapai suatu tujuan mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara. Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang

perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. *Tax Policy* dirumuskan oleh Lauddin Marsuni dalam Devano dan Rahayu (2006), sebagai:

1. Suatu pilihan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk:

- a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
- b. Perluasan objek pajak
- c. Penyempurnaan tarif pajak
- d. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Beberapa model kebijakan sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia, yaitu:

1. Model kelembagaan adalah model kebijakan negara yang memandang kebijakan negara sebagai hasil dari lembaga atau institusi kenegaraan atau institusi pemerintah

2. Model proses adalah model kebijakan negara yang memandang bahwa kebijakan negara sebagai proses dari suatu aktivitas politik, sebagai suatu rangkaian kegiatan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijaka
3. Model inkrementalis bahwa suatu kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu, dimana kebijakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan perpajakan pada masa lalu, walau dengan berbagai modifikasi.

R Santoso Brotodihardjo, memberi pengertian tentang hukum pajak yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antar negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak disebut wajib pajak (Rahayu, 2010). Menurut Lasmana , hukum pajak disebut dengan hukum fiskal. Fiskal berasal dari katas *fiscus* yang berarti tempat uang, pengertian fiskal berkembang menjadi segala sesuatu mengenai keuangan negara. Hukum pajak kemudian menerangkan bahwa:

- a. Siapa-siapa wajib pajak dan kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
- b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak
- c. Timbul dan hapusnya hutang pajak
- d. Cara penagihan pajak
- e. Cara mengajukan keberatan, dsb

Kesatuan lainnya yang terdapat dalam sistem perpajakan adalah *tax administration* artinya administrasi pajak. Administrasi lahir karena timbulnya suatu urusan agar tujuan dari urusan tersebut dapat tercapai, atau dengan kata lain karena adanya sekelompok orang yang mendapat tugas atau kewajiban (Djoned, 2005: 13). Prayudi Atmosudirdjo (2003), Gunadi (2005: 14), administrasi sebagai fenomena sosial, kekuatan atau *power*, fungsi tertentu, badan pimpinan, seni, ilmu, teknik atau keahlian, perilaku, sistem dan manajemen. Menurut A Dunsire dalam Devano dan Rahayu (2006: 71), *Administration* merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengancara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama. Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak Lumbathoruan (1997) (Devano dan Rahayu, 2006). Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Carlos A Silvani (Devano dan Rahayu, 2006), menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayer*), dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tetapi belum terdaftar.
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penyelundupan pajak (*tax evaders*), wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan adanya bank data dan seluruh aktivitas wajib pajak
4. Penunggak pajak (*delinquent tax payers*), upaya pencarian tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penangguhan secara insentif dalam setiap administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

Menurut Gunadi (2005: 16), Perubahan sistem perpajakan Indonesia menjadi *self assessment* merupakan salah satu upaya pemerintah agar wajib pajak dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan perpajakan. Dalam *self assessment* sistem kepercayaan menghitung, membayar, atau menyetor pajak dan pelaporan sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak,

sedangkan tugas aparatur pajak adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang di jalankan oleh wajib pajak. Dalam menunjang penerapan sistem self assessment DirJen Pajak menyediakan fasilitas sistem pendukung baru yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak yaitu *adanya e-Reg, e-Filling, e-SPT, e-NPWP, e-Billing, drop box* dan sistem pembayaran pajak melalui ATM melalui bank yang sudah ikut bekerja sama dalam mendukung berjalannya *e-Banking* (Setyonugroho, 2012).

5.4 Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Widayati dan nurlis (2010), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu mengenai seberapa jauh target perpajakan telah tercapai. Sedangkan Sutari dan Dewi (2013), menjelaskan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebagai proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) sistem perpajakan yang telah dicapai.

Pengukuran Persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan menurut Tatiana dan Priyo (2009) dapat diukur dengan menggunakan indikator empirik, yaitu:

1. Jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh
2. Pemanfaatan pajak secara tepat
3. Pelayanan yang baik oleh aparat

Sedangkan pengukuran indikator dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) lebih mengarah kepada persepsi terhadap fasilitas modern sistem perpajakan:

1. Pendaftaran NPWP menggunakan *e-register* melalui *website* pajak
2. Penggunaan *e-Filling* dan *e-SPT* untuk kegiatan pelaporan
3. Penggunaan *e-Banking* dalam membayar kewajiban pajak
4. Penyampaian SPT melalui *drop box*
5. Mengakses peraturan perpajakan melalui jaringan internet

Dari analisis teori diatas, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai penilaian atau kesan-kesan, pandangan baik yang diberikan wajib pajak terhadap kinerja perpajakan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Sikap dan pandangan wajib pajak terhadap pembaharuan sistem perpajakan yang di berikan oleh DirJen Pajak untuk memudahkan wajin pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kemauan membayar pajak.

B. Hasil Penelitian Relevan

Sebagai acuan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti karena sudah teruji sebelumnya, diantaranya:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Indipenden	Hasil Penelitian
Fikriningrum dan Syaffrudin (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan	Kemauan membayar pajak	Kesadaran (x1), Pengetahuan dan pemahaman (x2), persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan (x3), dan pelayanan fiskus (x4)	kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
Evi dan Budiarta (2013)	Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran (x1), Pengetahuan pajak (x2), Sanksi perpajakan (x3), akuntabilitas pelayanan publik (x4)	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Tedi Azwir Yuneita (2013)	Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP	Kemauan membayar pajak	Kesadaram (x1), pengetahuan dan pemahaman (x2), norma moral (x3)	Variabel Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, norma moral berpegaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan variabel

	Pratama Tampan Pekanbaru)			persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan
Pratiwi dan Setiawan (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar	Kepatuhan wajib pajak reklame	Kesadaran(x1), Kualitas pelayanan, (x2) kondisi keuangan (x3), dan persepsi sanksi perpajakan (x4)	kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak, berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
Harjanti dan Zulaikha (2012)	Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di wilayah KPP Pratma Cilacap)	Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran (x1), pelayanan fiskus (x2), dan sanksi pajak (x3)	Kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
Fuadi dan Mangoting (2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	peningkatan kepatuhan	Kualitas pelayanan (x1), Sanksi perpajakan (x2), dan biaya kepatuhan (x3)	kualitas pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan

				biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Widayati dan Nurlis (2010)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (KPP Pratama Gambir Tiga)	Kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak (x1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (x2), persepsi yang baik atau efektivitas system perpajakan (x3)	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan tidak signifikan terhadap kemauan, sedangkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan
Rantung dan Adi (2009)	Dampak Program <i>sunset policy</i> Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	<i>Sunset Policy</i>	Kemauan (x1), Kesadaran (x2), pengetahuan dan pemahaman (x3), dan persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan (x4)	<i>Sunset Policy</i> secara positif mempengaruhi kemauan, kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan
Amelia Ratih Larasati (2013)	Persepsi pengurus atas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan KPRI Tegal	Kepatuhan KPRI	Pelayanan (x1) Kesadaran (x2) Sanksi pajak (x3)	Kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI Pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI Pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan KPRI
Hariyadi Setyonugroho (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama	Kemauan Membayar Pajak	Kesadaran membayar pajak (x1), Pengetahuan dan Pemahaman peraturan	Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

	Surabaya Tegalsari		perpajakan (x2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (x3), Kualitas pelayanan (x4)	Pengetahuan dan Pemahaman, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
--	--------------------	--	--	---

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2014

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Fikriningrum dan Syaffrudin (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fikriningrum dan Syaffrudin (2012), yaitu:

1. Variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan diganti menjadi sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu berupa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Candisari, yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Pada penelitian ini penulis menggunakan sampel pemilik usaha kecil dan menengah di daerah Bandung dan jenis usaha tidak dibatasi, penyebaran kuesioner dilakukan oleh petugas LPDB.

C. Kerangka Teoritik

Secara Psikologi kemauan dapat diartikan sebagai adanya rasa, dorongan, dan aktifitas yang terjadi didalam diri seseorang melalui pertimbangan akal untuk melakukan dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Tatiana dan Priyo (2009), Kemauan kekuatan yang timbul atas rasa sadar dan hidup dan atau menciptakan sesuatu yang berdasarkan perasaan dan pikiran. Kemauan membayar pajak dikembangkan melalui

dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007) dalam (Widayati dan Nurlis, 2010). Konsep pajak, menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

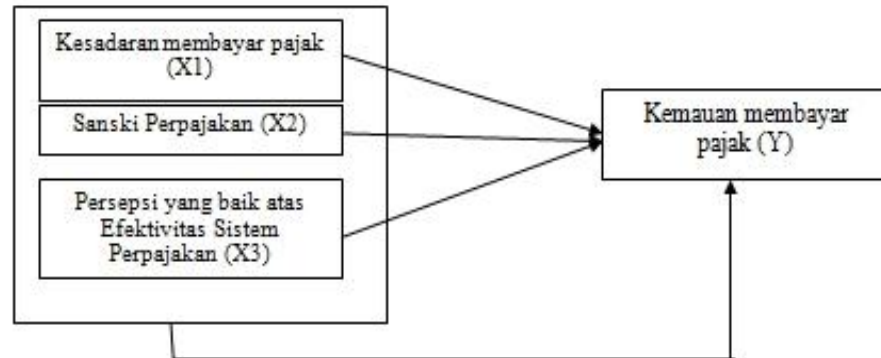
Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu *pertama*, tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, Menurut Marihot (2010), Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintahan mencapai tujuan negara dalam hal perpajakan untuk kepentingan masyarakat. Tingkat kesadaran merupakan hal yang utama karena kesadaran muncul dari dalam diri, kesadaran mempengaruhi tingkat kemauan membayar pajak, kemauan masyarakat secara suka rela akan meningkat karena sudah mengetahui bahwa hasil dari pajak yang dibayarkan akan digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya mengayomi masyarakat, yang berarti pemerintah juga akan memperoleh manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan.

Kedua, Pengetahuan Sanksi perpajakan sebagai pencegah adanya tindak pelanggaran dan kecurangan wajib pajak pribadi, badan maupun

pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai dorongan wajib pajak yang tidak datang dari dalam diri sendiri, karena adanya rasa takut apabila terkena hukuman bila melanggar peraturan maka wajib pajak akan lebih memilih untuk mematuhi peraturan, dengan adanya pengetahuan sanksi perpajakan seseorang akan lebih mengikuti atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan karena memiliki pengetahuan bahwa adanya tindakan yang akan diberikan atas sebuah pelanggaran.

Ketiga, Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan, persepsi merupakan sikap yang ditunjukkan seseorang setelah melakukan sesuatu dalam hal ini terhadap sistem perpajakan. Sikap wajib pajak terhadap kinerja perpajakan, pembaharuan sistem perpajakan yang diberikan oleh DirJen Pajak untuk memudahkan administrasi perpajakan dan meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak. Efektivitas diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan atas hasil melalui sebuah proses. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan diartikan sebagai adanya penilaian yang baik atas kinerja perpajakan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan dari sistem perpajakan, yang dapat menimbulkan kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja aparat pajak sehingga mendorong kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Gambar 2.2 Kerangka berfikir



Sumber: Data di olah oleh Penulis, 2014

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

1. Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan, melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Fikriningrum dan Syaffrudin, 2012). Penelitian Fikriningrum dan Syaffrudin menunjukkan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran mendorong tingkat kemauan membayar pajak, masyarakat akan mau membayar pajak secara sukarela karena sudah mengetahui bahwa hasil dari pajak yang dibayarkannya akan digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya mengayomi masyarakat, yang berarti pemerintah juga akan memperoleh manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan (Marihot, 2010).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak itu sendiri. Jika seseorang memandang bahwa pembayaran pajak itu penting, maka ia akan berperilaku patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan begitu juga sebaliknya. Penelitian Tedi, Azwir dan Yuneita (2013) mendukung hasil penelitian Fikrinigrum dan Syaffrudin bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan hipotesis diterima. Semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajaknya. Berdasarkan teori di atas, kesadaran membayar pajak di duga memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sehingga di ajukan hipotesis:

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak

2. Pengetahuan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Perilaku lain yang dinyatakan Kelman sebagai perilaku orang mau membayar pajak adalah *compliance attitude*. Sebagai faktor eksternal yang juga mempengaruhi seseorang mau membayar pajak, tetapi karena

adanya rasa takut. Faktor eksternal ini dapat diartikan sebagai sanksi pajak. Menurut Suandy (2011: 165), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) hipotesis yang diajukan tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh sanksi perpajakan telah terbukti. Dengan demikian adanya pengenaan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak UMKM yang melanggar ketentuan yang berlaku mempunyai peran dalam meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian Larasati (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan koperasi. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian menunjukkan bahwa pengurus KPRI kurang paham mengenai sanksi perpajakan. Ini dikarenakan tidak adanya pengenaan sanksi yang sebenarnya terhadap para pelanggar undang-undang perpajakan. Jika sanksi-sanksi yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan tersebut benar-benar ditegakkan tanpa memandang siapapun yang melanggar tentunya akan mengubah persepsi pengurus yang kurang paham terhadap sanksi.

Hasil penelitian Evi dan Budiarta (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar

Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Denpasar Bali. Dalam penelitian Harjanti dan Zulaikha (2012) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan teori di atas, sanksi pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sehingga diajukan hipotesis:

H2 : Pengetahuan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak

3. Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Persepsi (*perception*) merupakan proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins, 2008: 175). Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez (2005), menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Rantung dan Adi (2009) *Sunset policy* mempengaruhi secara positif faktor persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, wajib pajak akan membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak, Setyonugroho (2012) persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak,

dengan adanya sistem perpajakan yang lebih inovatif memberikan kemudahan dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) sejalan dengan hasil penelitian Permadi, Nasir dan Yuneita (2013) bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan teori di atas, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan di duga memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sehingga di ajukan hipotesis:

H3: Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak

4. Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan Sanksi perpajakan, dan Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Apabila kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang mendorong kemauan membayar pajak hal ini dapat di simpulkan bahwa kemauan membayar pajak dapat meningkat, apabila didukung kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sehingga hipotesis yang diajukan:

H4: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh Kesadaran membayar pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah
- 2) Pengaruh Pengetahuan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah
- 3) Pengaruh Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah
- 4) Pengaruh Kesadaran membayar pajak, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari kantor LPDB yang bertempat di Jalan letnan Mt Haryono kav 52-53. Lama penelitian dimulai dari Maret s.d Juni 2014.

Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil dan menengah di wilayah Bandung yang terdaftar di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012: 2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif, dengan pendekatan regresi linear berganda.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dengan cara memberikan kuesioner melalui staf LPDB yang bertugas dilapangan. Kemudian responden mengembalikan kuesioner, data yang diolah diperoleh dari jawaban kuesioner yang diisi oleh pemilik usaha kecil dan menengah.

D. Populasi dan Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Populasi dalam penelitian ini 324 pemilik usaha kecil dan menengah di wilayah Bandung.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 85). Karakter responden disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam analisis regresi berganda menurut Roscoe dalam Sekaran dan Bougie (2009: 297) jumlah sampel harus beberapa kali (10 – 20 kali) lebih besar dari jumlah variabel. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel, sehingga jumlah sample minimal yang harus diambil $4 \times 20 = 80$. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 161 sampel dari jumlah populasi pemilik usaha kecil dan menengah di Bandung yang terdaftar di LPDB. Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat Roscoe dalam Sekaran dan Bougie (2009).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian berupa angket (kuesioner), dengan cara menyerahkan kuesioner melalui staf yang bertugas dilapangan kemudian di bagikan kepada pemilik usaha kecil dan menengah. Pendapat responden digunakan *skala likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 93).

Tabel 3.1 Skala Pengukuran

Jawaban	Skor
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
RR = Ragu-ragu	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: data di olah Oleh Penulis, 2014

1. Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 39). Variabel depeden dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak.

1. Definisi Konseptual

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

2. Definisi Operational

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), kemauan membayar pajak diukur dengan beberapa indikator-indikator empirik, yaitu:

1. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
2. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.

3. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
4. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

2. Variabel Independen

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 39). Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu:

2.1 Kesadaran Membayar Pajak

1. Definisi Konseptual

Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan, melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Fikriningrum, 2012).

2. Definisi Operational

Kesadaran masyarakat di dorong dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan (Marihhot, 2010: 103). Irianto (2005) dalam Rantung dan Adi (2009), terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak merugikan negara
3. pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.2 Pengetahuan Sanksi Perpajakan

1. Definisi Konseptual

Menurut Suandy (2011: 165), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2. Definisi Operasional

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2011):

1. Sanksi administrasi

- a. Sanksi bunga
- b. Sanksi denda
- c. Sanksi kenaikan

2. Sanksi pidana

- a. Denda pidana
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana penjara

2.3 Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

1. Definisi Konseptual

Menurut Sutari dan Dewi (2013), Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam

memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) sistem perpajakan yang telah dicapai.

2. Definisi Operational

Menurut Rantung dan Adi (2009) Persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan dapat diukur dengan menggunakan indikator, yaitu:

1. Jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh
2. Pemanfaatan pajak secara tepat
3. Pelayanan yang baik oleh aparat

pengukuran indikator dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) lebih mengarah terhadap fasilitas modern perpajakan:

1. Pendaftaran NPWP menggunakan *e-register* melalui *website* pajak
2. Penggunaan *e-Filling* dan *e-SPT* untuk kegiatan pelaporan
3. Penggunaan *e-Banking* dalam membayar kewajiban pajak
4. Penyampaian SPT melalui *drop box*
5. Mengakses peraturan perpajakan melalui *website* pajak

Tabel 3.2 Operational Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Indikator	Butir Pernyataan
Kesadaran membayar pajak	Irianto (2005) dalam Rantung dan Adi (2009)	1. Pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	1,5,10,11,13
		2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak merugikan negara	2,6,12,14
		3. pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.	3,7,15
	Kesadaran masyarakat di dorong dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan (Marihhot, 2010: 103)	4. Pendidikan dan Pengetahuan perpajakan	4,8,9,16,17
Pengetahuan Sanksi Perpajakan	Mardiasmo (2011)	1. Sanksi bunga 2. Denda administrasi 3. Kenaikan tarif	18, 20,22,24,26,28
		1. Denda pidana 2. Pidana Kurungan 3. Pidana Penjara	19,21,23,25,27,29
Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan	Rantung dan Adi (2009)	1. Jumlah pajak tidak membebaskan	30,34,38,41,42
		2. Pemanfaatan pajak secara tepat	31,35
		3. Pelayanan yang baik oleh petugas	32,36,39
	Widayati dan Nurlis (2010)	1. <i>drop box</i> 2. e-SPT dan e-filling 3. e-banking 4. e-register 5. <i>website</i> pajak	32,36,39,42,43
Kemauan membayar pajak	(Widayati dan Nurlis, 2010)	1. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.	44, 48, 52
		2. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.	45, 49
		3. Informasi mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak.	46, 50, 54
		4. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.	47, 51, 53

Sumber: diolah oleh Penulis, 2014

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011, 19), Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemecengan distribusi).

2. Pengujian Kualitas Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan program komputer SPSS 19.0.

2.1 Uji Validitas

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat variabel yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor memiliki tingkat signfikasi di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2011: 52).

Validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka item item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total (dinyatakan tidak valid).

2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji *cronbach alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.70 (Nunnally, 1994) dalam (Ghozali, 2011).

3. Uji asumsi klasik

Dalam penelitian ini dilakukan empat jenis uji asumsi klasik. Keempat uji asumsi klasik ini, sebagai berikut:

3.1 Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011: 160). Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis maka pola distribusi normal
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal menunjukkan pola distribusi tidak normal

Uji normalitas menggunakan grafik dapat menyesatkan karena secara visual terlihat normal tetapi secara statistik bisa diartikan terbalik. Sebab itu dalam penelitian ini diimbangi dengan uji statistik, Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal.

2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011: 105). Multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 .

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 artinya mengindikasikan terjadi multikolonieritas.

3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Dapat dideteksi dengan menggunakan dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED)

dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*.

1. Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Karena uji plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan, diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

1. Jika signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011: 110). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

4. Regresi Linear Berganda (*multiple regression*)

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda. Nachrowi (2006), regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 KSP + \beta_2 PSP + \beta_3 PESP + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Kemauan membayar pajak
α	=	konstanta
β_1	=	koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak
β_2	=	koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan
β_3	=	koefisien regresi variabel Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan
KSP	=	Kesadaran membayar pajak
PSP	=	Pengetahuan Sanksi Perpajakan
PESP	=	Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan
ε	=	error

5. Uji hipotesis

5.1 Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).

5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 98). Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji Uji-t adalah jika jumlah *degree offreedom* (df) adalah 20 atau lebih dan tingkat kepercayaan < 0,05 atau 5%, maka H₀ yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai $t > 2$ (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima H_a, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji-F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011:98). Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji uji statistik F adalah jika nilai $F > 4$ maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan $< 0,05$ atau 5%. Dengan kata lain, hipotesis alternatif atau H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah faktor-faktor sebagai variabel dalam penelitian ini mempengaruhi tingkat kemauan pemilik usaha kecil dan menengah dalam membayar pajaknya. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kecil dan menengah di wilayah Bandung yang terdaftar di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebanyak 324 orang. Data responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 161 orang pemilik usaha kecil dan menengah dari populasi 324 pemilik usaha kecil dan menengah yang terdaftar di LPDB yang terdapat di Bandung. Penelitian ini dilakukan di KOPANTI Bandung Trade Center, Bandung Timur. Penelitian dimulai dengan memperoleh daftar pemilik usaha kecil dan menengah sebagai populasi, dan kemudian memberikan kuesioner kepada staf lapangan LPDB yang kemudian disebarkan oleh staf lapangan kepada responden. Waktu penyerahan kuesioner tanggal 1 Mei 2014 dan kuesioner diterima kembali dari staf tanggal 12 Mei 2014. Aspek yang diteliti meliputi variabel-variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1), Pengetahuan Sanksi Perpajakan (X2), Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3), dan Kemauan Membayar Pajak (Y).

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	167	100%
Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang tidak kembali	6	3,59%
Kuesioner yang kembali	161	96,41%
Kuesioner yang digugurkan	0	0%
Kuesioner yang digunakan	161	96,41%
<i>Respon rate</i>	$167/167 \times 100\% =$	100%
<i>Usable respon rate</i>	$161/167 \times 100\% =$	96,41%

Sumber : data diolah oleh penulis, 2014

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar ke responden sebanyak 167 kuesioner dan yang kembali sebanyak 161. Tidak terdapat kuesioner yang digugurkan karena kuesioner diisi secara lengkap, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang layak digunakan untuk dianalisis sebanyak 161 kuesioner. Sampel 167 didapat dari total populasi sebesar 324 dengan signifikan 5% berdasarkan tabel Isaac pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Isaac dan Michael

N	S			N	S			N	S		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	115	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	317	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	155	5000	586	326	257
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	563	345	269
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	655	346	269
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	94	84	78	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	102	89	83	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	109	95	88	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	116	100	92	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	122	105	97	1050	414	265	217	400000	662	348	270
160	129	110	101	1100	427	270	221	450000	663	348	270
170	135	114	105	1200	440	275	224	500000	663	348	270
180	142	119	108	1300	450	279	227	550000	663	348	270
190	148	123	112	1400	460	283	229	600000	663	348	270
200	154	127	115	1500	469	286	232	650000	663	348	270
210	160	131	118	1600	477	289	234	700000	663	348	270
220	165	135	122	1700	485	292	235	750000	663	348	271
230	171	139	125	1800	492	294	237	800000	663	348	271
240	176	142	127	1900	498	297	238	850000	663	348	271
250	182	146	130	2000	510	301	241	900000	663	348	271
260	187	149	133	2200	520	304	243	950000	663	348	271
270	192	152	135	2600	529	307	245	1000000	664	349	272

Sumber: Sugiyono, 2012

1. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah di wilayah Bandung. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 161 orang dengan karakteristik penelitian jenis kelamin, usia, lama usaha, peredaran omzet, bentuk usaha, memiliki NPWP, pendidikan akhir, Pembayaran pajak, Pengetahuan Pajak.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Jenis Kelamin	Laki-laki	112	70%
	Perempuan	49	30%
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.3 dapat diketahui dari total 161 responden terdapat 112 responden laki-laki atau sebesar 70% responden laki-laki dan responden perempuan sebanyak 49 orang atau sebesar 30%, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden sebagian besar responden pemilik usaha berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Usia	25 – 35 thn	67	42%
	36 – 45 thn	77	48%
	46 – 55 thn	13	8%
	>55 thn	4	2%
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.4 dapat diketahui, jumlah responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 67 orang atau sebesar 42%, 36-45 tahun sebanyak 77 orang atau sebesar 48%, 46-55 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 8% dan yang terkecil dari usia > 55 tahun sebanyak 4 orang atau hanya sebesar 2%. Dengan demikian, sebagian besar responden yang menjalankan usaha kecil dan menengah berusia 36-45 tahun.

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Lama Usaha	<5 thn	87	54%
	5 – 10 thn	67	42%
	>10 thn	7	4%
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.5 dapat diketahui, jumlah responden yang menjalankan usaha < 5 tahun sebanyak 87 orang atau sebesar 53%, 5-10 tahun sebanyak 67 orang atau sebesar 42%, dan usaha yang berjalan > 10 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 4%. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menjalankan usaha kecil dan menengah karena sebagian besar responden yang menjalankan usaha < 5 tahun.

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Peredaran Omzet

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Peredaran Omzet	100 – 250jt	115	71%
	250 – 500 jt	40	25%
	>500 jt	6	4%
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.6 dapat diketahui, jumlah responden yang memiliki peredaran omzet 100-250 juta sebanyak 115 orang atau sebesar 71%, 250-500 juta sebanyak 40 orang atau sebesar 25%, dan responden yang memiliki peredaran omzet > 500 juta sebanyak 6 orang atau sebesar 4%. Dengan demikian, sebagian besar responden pemilik usaha memiliki peredaran omzet 100-250 juta.

Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Bentuk Usaha

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Bentuk Usaha	Perorangan	125	78%
	CV	32	20%
	PT	4	2%
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.7 dapat diketahui, jumlah responden yang mendirikan usaha perorangan sebanyak 125 orang atau sebesar 78%, CV sebanyak 32 orang atau sebesar 20%, dan PT sebanyak 4 orang atau sebesar 2%. Dengan demikian, sebagian besar responden pemilik usaha menjalankan bentuk usaha yang dimiliki secara perorangan.

Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
NPWP	Ya	161	100%
	Tidak	0	0
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.8 dapat diketahui, dari seluruh responden pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki NPWP sebanyak 161 orang atau sebesar 100% responden memiliki NPWP. Dengan demikian, seluruh responden yang merupakan pemilik usaha kecil dan menengah ini memiliki NPWP.

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Pendidikan Akhir	SD	-	-
	SMP	1	1%
	SMA/ sederajat	55	34%
	D1	65	40%
	D2	3	2%
	D3	29	18%
	S1	67	42%
	S2	4	2%
	S3	-	-
TOTAL		161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.9 dapat diketahui, responden memiliki pendidikan akhir paling rendah smp sejumlah 1 orang atau sebesar 1%, SMA/ sederajat sebanyak 55 orang atau sebesar 34%, D1 sebanyak 2 orang atau sebesar 1%, D2 sebanyak 3 orang atau sebesar 2%, D3 sebanyak 29 orang atau sebesar 18%, S1 sebanyak 67 orang atau sebesar 42%, dan S2 sebanyak 4 orang atau sebesar 2% Dengan demikian, sebagian besar responden pemilik usaha menyelesaikan studi sampai dengan S1.

Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Pembayaran Pajak

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Pembayaran Pajak	Bank	131	81%
	Pos	17	11%
	Lainnya	13	8%
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.10 dapat diketahui, jumlah responden yang melakukan pembayaran pajak melalui Bank sebanyak 131 orang atau sebesar 81%, melalui pos sebanyak 17 orang atau sebesar 11%, dan lainnya sebanyak 13 orang atau sebesar 8%. Dengan demikian, sebagian besar responden sebagian besar responden pemilik usaha melakukan pembayaran pajak melalui bank.

Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
Pengetahuan Pajak	Media Elektronik	72	45%
	Media Cetak	16	10%
	Sosialisasi Pajak	26	16%
	Lainnya	47	29%
	TOTAL	161	100%

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Dari tabel 4.11 dapat diketahui, jumlah responden yang memperoleh pengetahuan pajak melalui media elektronik sebanyak 72 orang atau sebesar 45%, melalui media cetak sebanyak 16 orang atau sebesar 10%, yang memperoleh pengetahuan pajak melalui kegiatan sosialisasi pajak sebanyak 26 orang atau sebesar 16% dan lainnya diluar dari pilihan yang dicantumkan sebanyak 47 orang atau sebesar 29%. Dengan demikian, sebagian besar responden sebagian besar responden pemilik usaha memperoleh pengetahuan pajak melalui media elektronik.

Dapat disimpulkan berdasarkan data responden diatas bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan usia berkisar 36-45 tahun, baru mendirikan usaha kurang dari 5 tahun, peredaran omzet mencapai 100-250 juta, dengan bentuk usaha perorangan, seluruh responden memiliki NPWP, tingkat pendidikan akhir yang ditempuh sampai dengan

S1, melakukan pembayaran pajak melalui bank dan mayoritas responden memperoleh pengetahuan pajak lebih sering melalui media elektronik.

2. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sample dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kesadaran membayar pajak, Sanksi Perpajakan, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan Kemauan membayar pajak. Analisis penelitian berdasarkan pada hasil jawaban responden atas 32 pernyataan.

Berikut merupakan statistic deskriptif nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dalam tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSP	161	22	38	30,80	2,943
SP	161	23	37	30,16	2,944
PESP	161	19	35	26,65	2,869
KMP	161	28	45	37,39	2,914
Valid N (listwise)	161				

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2014

Tabel 4.14 diatas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 161 sampel yang diolah dengan empat variabel yaitu Kesadaran membayar pajak,

Pengetahuan Sanksi Perpajakan, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan Kemauan membayar pajak, dalam penelitian ini masing-masing memiliki nilai rata-rata 30,80 ; 30,16 ; 26,65 dan 37,39. Seluruh variabel diukur dengan menggunakan *skala likert*. Adapun penjelasan dari pengukuran statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Variabel kesadaran membayar pajak dengan menggunakan 8 item pernyataan sehingga kisaran jawaban berkisar antara 8-38. Skor kisaran actual untuk variabel kesadaran membayar pajak adalah 22-38 dengan nilai *mean* 30,80. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha kecil dan menengah cukup memiliki kesadaran membayar dalam membayar pajak.
- b. Variabel Sanksi perpajakan dengan menggunakan 8 item pernyataan sehingga kisaran jawaban berkisar antara 8-37. Skor kisaran actual untuk variabel sanksi perpajakan adalah 23-37 dengan nilai *mean* 30,16. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik usaha kecil dan menengah yang menjadi responden dalam penelitian ini mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang diterapkan dalam perpajakan memiliki skor yang berkisar antara 23-37.
- c. Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dengan menggunakan 7 item pernyataan sehingga kisaran jawaban berkisar antara 7-35 . skor kisaran actual untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah 19-35 dengan nilai *mean* 26,65. Hal

ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap perpajakan.

- d. Variabel kemauan membayar pajak dengan menggunakan 9 item pernyataan sehingga kisaran jawaban berkisar antara 9-45 . skor kisaran aktual untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah 28-45 dengan nilai *mean* 37,39. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kemauan untuk membayar pajak.

B. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini yaitu 20 pemilik usaha kecil dan menengah pada UKM Mitra LPDB Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel ini dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil dan menengah.

Jumlah item pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 54 item, terdiri dari pernyataan variabel kesadaran membayar pajak sebanyak 17 item, pernyataan variabel sanksi perpajakan sebanyak 11 item, pernyataan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebanyak 15 item dan pernyataan variabel kemauan

membayar pajak sebanyak 11 item. Dengan menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0.444 Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai r hitung > dari r tabel atau lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	Nilai Korelasi	R tabel	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	X1.1	0,078	0,444	Tidak Valid
	X1.2	0,582	0,444	Valid
	X1.3	0,682	0,444	Valid
	X1.4	0,601	0,444	Valid
	X1.5	0,612	0,444	Valid
	X1.6	0,752	0,444	Valid
	X1.7	0,414	0,444	Tidak Valid
	X1.8	0,665	0,444	Valid
	X1.9	0,465	0,444	Valid
	X1.10	0,330	0,444	Tidak Valid
	X1.11	-0,229	0,444	Tidak Valid
	X1.12	-0,228	0,444	Tidak Valid
	X1.13	-0,191	0,444	Tidak Valid
	X1.14	-0,620	0,444	Tidak Valid
	X1.15	-0,362	0,444	Tidak Valid
	X1.16	-0,572	0,444	Tidak Valid
	X1.17	0,665	0,444	Valid
Pengetahuan Sanksi Perpajakan	X2.18	0,718	0,444	Valid
	X2.19	0,904	0,444	Valid
	X2.20	0,826	0,444	Valid
	X2.21	0,749	0,444	Valid
	X2.22	0,737	0,444	Valid
	X2.23	0,683	0,444	Valid
	X2.24	0,744	0,444	Valid
	X2.25	0,747	0,444	Valid
	X2.26	-0,270	0,444	Tidak Valid
	X2.27	-0,134	0,444	Tidak Valid
	X2.28	-0,066	0,444	Tidak Valid
Persepsi	X3.29	0,679	0,444	Valid

Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan	X3.30	0,516	0,444	Valid
	X3.31	0,656	0,444	Valid
	X3.32	0,355	0,444	Tidak Valid
	X3.33	-0,097	0,444	Tidak Valid
	X3.34	-0,060	0,444	Tidak Valid
	X3.35	0,488	0,444	Valid
	X3.36	-0,017	0,444	Tidak Valid
	X3.37	0,689	0,444	Valid
	X3.38	0,380	0,444	Tidak Valid
	X3.39	0,320	0,444	Tidak Valid
	X3.40	0,183	0,444	Tidak Valid
	X3.41	0,505	0,444	Valid
	X3.42	0,581	0,444	Valid
	X3.43	0,408	0,444	Tidak Valid
Kemauan Mmembayar Pajak	Y.44	0,822	0,444	Valid
	Y.45	0,805	0,444	Valid
	Y.46	0,890	0,444	Valid
	Y.47	0,822	0,444	Valid
	Y.48	0,869	0,444	Valid
	Y.49	0,808	0,444	Valid
	Y.50	-0,154	0,444	Tidak Valid
	Y.51	0,010	0,444	Tidak Valid
	Y.52	0,734	0,444	Valid
	Y.53	0,834	0,444	Valid
	Y.54	0,772	0,444	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Pernyataan yang valid dalam penelitian memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0.444 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 20 responden serta memiliki signifikansi lebih rendah dari α yang ditentukan yakni 5%, sehingga jumlah pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 pernyataan, terdiri dari variabel kesadaran membayar pajak 8 pernyataan, variabel pengetahuan sanksi perpajakan 8 pernyataan, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan 7 pernyataan dan variabel kemauan membayar pajak 9 pernyataan.

b. Uji Reliabilitas

Item pernyataan yang dinyatakan reliabel adalah yang memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.70 (Nunnally, 1994, dalam Ghozali, 2011:48). Jika variabel memberikan nilai tersebut maka dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	>/<	Tetapan	Keterangan
Kesadaran membayar pajak	0.862	>	0.70	Reliabel
Pengetahuan Sanksi perpajakan	0.926	>	0.70	Reliabel
persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan	0.859	>	0.70	Reliabel
Kemauan membayar pajak	0.955	>	0.70	Reliabel

Sumber : Data diolah oleh penulis (2014)

Berdasarkan Tabel 4.14, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* yang melebihi 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel-variabel uji adalah reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum membahas analisis dengan teknik regresi harus melalui uji asumsi klasik terlebih dahulu, uji asumsi klasik dimaksudkan untuk membuktikan tidak terdapat masalah dalam data penelitian, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji statistic dengan pengujian Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil Uji normalitas dapat dilihat pada table 4.15 berikut:

Tabel 4.15 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		161
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,55842795
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,090
	Negative	-,092
Kolmogorov-Smirnov Z		1,165
Asymp. Sig. (2-tailed)		,132

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data di olah oleh penulis, 2014

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai K-S pada Asymp Sig (2 tailed) adalah 0,132 dimana lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan dari hasil perhitungan uji normalitas data berdistribusi normal. Dengan analisis tersebut dapat diambil keputusan bahwa data yang digunakan telah memenuhi persyaratan normalitas dan model regresi ini layak untuk dilanjutkan kepengujian tahap berikutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji normalitas dapat dilihat pada table 4.16 berikut:

Tabel 4.16 Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	20,705	2,778		7,452	,000			
	KSP	,279	,076	,282	3,692	,000	,840	1,191	
	SP	-,027	,076	-,027	-,349	,728	,823	1,215	
	PESP	,333	,076	,328	4,373	,000	,871	1,148	

a. Dependent Variable: KMP

Sumber : data di olah oleh penulis, 2014

Berdasarkan tabel hasil multikolinearitas di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen (kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan) yang mempunyai nilai *tolerance* dan $VIF < 10$. Variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai VIF 1.191, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai VIF 1.215, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki nilai VIF 1.148. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser. Hasil uji glejser dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji Glejser

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,636	1,850		,884	,378
	KSP	,041	,050	,069	,805	,422
	SP	-,091	,051	-,156	-1,797	,074
	PESP	,066	,051	,109	1,297	,197

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : data diolah oleh, 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0.05 yang berarti tidak ada yang signifikan. Dalam uji glejser, jika variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Autokorelasi

Tabel 4.18 Durbin Watson (DW)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,479 ^a	,229	,214	2,583	1,848

a. Predictors: (Constant), PESP, KSP, SP

b. Dependent Variable: KMP

Sumber : data diolah oleh penulis, 2014

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh nilai Durbin Watson hitung sebesar 1,848. Oleh karena nilai DW tersebut diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi, dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Pengaruh (Analisis Regresi Ganda)

Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) terhadap kemauan membayar pajak (Y), maka penulis menggunakan teknik analisis regresi dengan bantuan program komputer SPSS versi 19.0. Hasil pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20,705	2,778		7,452	,000		
	KSP	,279	,076	,282	3,692	,000	,840	1,191
	PSP	-,027	,076	-,027	-,349	,728	,823	1,215
	PESP	,333	,076	,328	4,373	,000	,871	1,148

b. Dependent Variable: KMP

Sumber : data di olah oleh penulis, 2014

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{KMP = 20,705 + 0,279 KSP - 0,027 SP + 0,333 PESP}$$

keterangan:

KMP = Kemauan Membayar Pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

KSP = Kesadaran Membayar Pajak

PSP = Pengetahuan Sanksi Perpajakan

PESP = Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Hasil diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 20,705 menyatakan bahwa jika kesadaran membayar pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) dianggap konstan, maka kemauan membayar pajak (Y) adalah 20,705.
- 2) Koefisien KSP sebesar 0,279 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan variabel X_1 (membayar pajak) akan meningkatkan variabel Y (kemauan membayar pajak) sebesar 0,279. Setiap peningkatan 1% variabel kesadaran membayar pajak akan meningkatkan probabilitas kemauan membayar pajak.
- 3) Koefisien PSP sebesar - 0,027 menyatakan bahwa setiap pengurangan (karena bertanda negatif) satu satuan variabel X_2 (pengetahuan sanksi perpajakan) akan mengurangi variabel Y (kemauan membayar pajak) sebesar - 0,027. Setiap pengurangan 1% variabel sanksi perpajakan akan meningkatkan probabilitas kemauan membayar pajak.
- 4) Koefisien PESP sebesar 0,333 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan variabel X_3 (persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan) akan meningkatkan variabel Y (kemauan membayar pajak) sebesar 0,333. Setiap peningkatan 1% variabel persepsi yang baik atas

efektivitas sistem perpajakan akan meningkatkan probabilitas kemauan membayar pajak.

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien determinasi (R²)

Tabel 4.20 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,479 ^a	,229	,214	2,583	1,848

a. Predictors: (Constant), PESP, KSP, PSP

b. Dependent Variable: KMP

Sumber : data diolah oleh penulis, 2014

Pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa $R^2 = 0.214$, ini dapat ditafsirkan bahwa kesadaran membayar wajib pajak (X_1), pengetahuan sanksi perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) terhadap kemauan membayar pajak (Y) sebesar 0,214 yang berarti bahwa 21,4% variasi nilai variabel Y (kemauan membayar pajak) dapat dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) sedangkan sisanya kemauan membayar pajak dapat dijelaskan variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari variabel yang dimasukkan ke dalam model (variabel kesadaran membayar wajib pajak (X_1), pengetahuan sanksi perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3)) dan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 0.05, ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak (Y).

Nilai t-tabel untuk $n = 161$ yaitu sebesar 1.975. Hasil dari uji t dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.21 Uji Parsial (Uji-t)

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	20,705	2,778		7,452	,000			
	KSP	,279	,076	,282	3,692	,000	,840	1,191	
	SP	-,027	,076	-,027	-,349	,728	,823	1,215	
	PESP	,333	,076	,328	4,373	,000	,871	1,148	

c. Dependent Variable: KMP

Sumber : data di olah oleh penulis, 2014

a. Hipotesis pertama

H_1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh *nilai sig* variabel X_1 sebesar 0,000 dan nilai $t_{hitung} (3.692) > t_{tabel} (1.975)$. Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α)

sebesar 5%, sehingga nilai $sig < \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak (X_1) terhadap kemauan membayar pajak (Y), artinya bahwa H_1 dalam penelitian ini diterima. Jika kesadaran membayar pajak pemilik usaha tinggi maka kemauan membayar pajak akan meningkat.

b. Hipotesis kedua

H_2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh *nilai sig* variabel X_2 sebesar $0,728 > 0,05$ atau diatas tingkat signifikansi. Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai $sig < \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H_0 diterima atau H_a ditolak yang berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan (X_2) terhadap kemauan membayar pajak (Y), artinya bahwa H_2 dalam penelitian ini ditolak.

c. Hipotesis Ketiga

H_3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh *nilai sig* variabel X_3 sebesar 0,000 dan nilai t_{hitung} (4,373) $> t_{tabel}$ (1,975). Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai $sig < \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan

H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh antara persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) terhadap kemauan membayar pajak (Y), artinya bahwa H_3 dalam penelitian ini diterima. Jika persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat sehingga akan mendorong kemauan untuk membayar pajak akan meningkat.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Setelah diketahui terdapat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen, selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji F. Uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA dari hasil regresi linear berganda. Dengan menggunakan sampel sebanyak 161 dan tingkat keyakinan 95% maka didapat nilai F tabel sebesar 2.66.

H_0 : Tidak ada pengaruh antara kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

H_a : Adanya pengaruh antara kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Selanjutnya untuk menentukan apakah hipotesis alternatif mengenai pengaruh simultan ketiga variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam penelitian ini dapat dilakukan perbandingan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$), maka hipotesis alternatif diterima.

Tabel 4.22 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	311,059	3	103,686	15,544	,000 ^a
	Residual	1047,289	157	6,671		
	Total	1358,348	160			

a. Predictors: (Constant), PESP, KSP, SP

b. Dependent Variable: KMP

Sumber : data diolah oleh penulis, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan uji pengaruh simultan (uji-f) 15,544 diperoleh signifikansi F sebesar 0,000. Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai signifikansi $F < \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara simultan variabel independen kesadaran membayar wajib pajak (X_1), pengetahuan sanksi perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) mempengaruhi variabel dependen kemauan membayar pajak (Y).

C. Pembahasan

Hasil yang didapat dari penelitian ini dengan melibatkan responden pemilik usaha kecil dan menengah sebanyak 161 orang yang di wilayah Bandung yang terdaftar di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dalam penelitian ini terdapat empat variabel.

Variabel pertama kesadaran membayar pajak yang terdiri dari indikator yang diadopsi dari jurnal Rantung dan Adi (2009) serta Marihot (2010) yang terdiri dari pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak merugikan negara, pajak ditetapkan undang-undang dapat dipaksakan, dan pendidikan dan pengetahuan perpajakan.

Variabel kedua yaitu pengetahuan sanksi perpajakan menggunakan indikator terdiri dari jenis-jenis sanksi perpajakan Mardiasmo (2011), yang dibagi menjadi sanksi administrasi (sanksi bunga, denda administrasi, dan kenaikan tarif) dan sanksi pidana (denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara).

Variabel ketiga yaitu persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dari indikator yang diadopsi dari jurnal Rantung dan Adi (2013) serta Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari persepsi jumlah pajak tidak membebankan, pemanfaatan pajak secara tepat, pelayanan yang baik oleh petugas, fasilitas perpajakan (*drop box, e-SPT, e-Filling, e-Banking, e-Register, dan website*).

Variabel keempat yaitu kemauan membayar pajak dengan indikator yang diadopsi dari jurnal Widayati dan Nurlis (2010) terdiri dari dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi cara dan tempat pembayaran pajak, informasi batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak, dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis pertama diterima hasil ini mengartikan bahwa variabel independen kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial dengan t hitung sebesar 3,692 yang menunjukkan nilai lebih besar dari t tabel 1,975 dan memiliki tingkat signifikansi lebih kecil 0,000 dari 0,05. Pada hasil regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh pada variabel kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak artinya jika kesadaran membayar pajak pada setiap pemilik usaha tinggi maka akan mendorong kemauan untuk membayar pajak menjadi semakin tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Fikriningrum dan Syaffrudin (2012), Harjanti dan Zulaikha (2012), serta Tedi, Azwir dan Yuneita (2013) yang meneliti tentang kesadaran membayar pajak semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak maka akan semakin tinggi pula kemauan membayar pajaknya. Jika seseorang menyadari atau

tidak tentang pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat khususnya diri pribadi maka dia akan memenuhi kewajiban pajaknya . Pajak sebagai salah satu pendapatan yang paling diandalkan oleh pemerintah alasan negara dapat terus melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan karena peran pajak yang mendukung. Kelman (1966) dalam Marihot (2010: 106) menyatakan bahwa ketika seseorang menyadari bahwa pajak memiliki fungsi dan kegunaan bagi dirinya dan masyarakat luas maka dia akan mau membayarkan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian hal ini juga tercermin pada butir 4 mengenai kesadaran bahwa pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan dalam negeri sebanyak 141 responden menjawab setuju dan sangat setuju, dan dalam pernyataan tersebut memiliki total skor yang tinggi. Hasil ini dapat menjelaskan hampir keseluruhan pemilik usaha kecil dan menengah setuju bahwa pajak merupakan hal penting dan turut memiliki bagian besar dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, responden juga menyadari bahwa pajak merupakan hal yang penting maka melakukan penundaan pembayaran pajak sama dengan menghambat berjalannya proses pemungutan pajak yang bisa berdampak pada penerimaan pajak hal ini tercermin pada butir 1 yang sebanyak 155 responden menjawab setuju dan sangat setuju, Oleh karena itu semakin tinggi kesadaran seseorang tentang pentingnya suatu hal akan mendorong individu tersebut dalam memutuskan suatu hal apakah keputusan yang

baik ataupun buruk. pernyataan-pernyataan ini berasal dari indikator yang di adopsi dari jurnal Rantung dan Adi (2009).

2. Pengaruh Pengetahuan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis kedua ditolak hasil ini mengartikan bahwa variabel independen pengetahuan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial dengan nilai t hitung sebesar - 0,349 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari t tabel 1,975 dan memiliki tingkat signifikansi 0,728 lebih besar dari 0,05. Hipotesis kedua menunjukkan tidak signifikan, semakin rendah pengetahuan sanksi perpajakan maka kemauan pemilik usaha kecil dan menengah dalam membayarkan pajaknya semakin rendah. Dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan yang diterima tidak menjamin seseorang akan lebih mengetahui mengenai peraturan sanksi perpajakan, dalam penelitian ini dari total seluruh responden sebesar 77% berpendidikan akhir SMP,SMA,D1 dan D2 sedangkan 62% berpendidikan akhir S1-S2. Hal ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi yang diberikan khususnya pada pemilik usaha di kota Bandung mengenai sanksi perpajakan. Kurangnya tingkat pengetahuan mengenai sanksi perpajakan menyebabkan seseorang akan bertindak tidak sesuai dengan peraturan karena ketidaktahuan pemilik usaha bahwa setiap perbuatan yang dinyatakan melanggar peraturan pajak seperti tidak memenuhi atau menunda kewajiban pajaknya akan dikenakan sanksi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil dari Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dari hasil penelitian Winerungan (2013), juga menyatakan sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari masyarakat di Kota Manado dan Kota Bitung dan berkaitan dengan sanksi keterlambatan membayar pajak yang bisa memberatkan masyarakat dan faktor lain yang bisa mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap fungsi penting pajak.

Penelitian Edo, Yunilma dan Daniati (2012) sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kelman (1966) dalam MARIHOT (2010: 106) menyatakan terdapat tiga perilaku orang mau membayar pajak salah satunya *compliance attitude* (perilaku patuh), suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Apabila peraturan yang mengatur lemah, kurang pengawasan, dan ketegasan pemerintah maka akan terjadi usaha menyembunyikan, menyelundupkan atau tidak membayar pajak. Selain ketegasan sanksi, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan juga merupakan hal yang penting, salah satu alasan seseorang kurang mentaati peraturan, karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman membuat seseorang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan sebenarnya telah melanggar peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian hal ini juga tercermin pada butir 9 mengenai pengetahuan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak, hal tersebut sesuai dengan jawaban yang diberikan responden terhadap pernyataan. Banyak responden menjawab ragu-ragu dan tidak setuju, hal ini dapat artikan bahwa sebagian responden belum mengetahui bahwa adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila terlambat membayarkan pajak pernyataan ini juga memiliki total skor rendah.

Selain itu, kurangnya pengetahuan sanksi perpajakan tercermin dari pernyataan butir 15 atas adanya kesengajaan menerbitkan faktur pajak tanpa didasari adanya transaksi yang terjadi memiliki skor paling rendah dari butir variabel pengetahuan sanksi perpajakan yang lain banyak responden menjawab ragu-ragu. Pernyataan-pernyataan ini mewakili indikator sanksi perpajakan dari Mardiasmo (2011).

3. Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis ketiga diterima hasil ini mengartikan bahwa variabel independen persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial dengan nilai t hitung sebesar 4,373 yang menunjukkan nilai lebih besar dari t tabel 1,975 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Hipotesis ketiga menunjukkan adanya pengaruh antara persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap tingkat kemauan membayar pajak yang artinya adanya penilaian yang baik pada kinerja perpajakan dimana responden membayarkan pajaknya karena apresiasi atas kinerja dari pemerintah yang dari waktu ke waktu semakin baik. Pada hasil regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh positif pada variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, dapat diartikan jika persepsi atas sistem perpajakan semakin baik tingkat kepercayaan responden dengan kinerja perpajakan akan semakin tinggi, dengan sistem perpajakan yang semakin modern, jika didukung oleh pihak internal yang berkualitas akan semakin meningkatkan penilaian yang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Cummings dan Vasquez (2005), Rantung dan Adi (2009), Fikriningrum dan Syaffrudin (2012), serta Setyonugroho (2012) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan arah positif yang berarti semakin baik penilaian yang diberikan wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan maka semakin besar pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak akan membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak, dan adanya sistem perpajakan yang lebih inovatif memberikan kemudahan dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini tercermin pada butir 17 dan 22 pemerintah telah menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan objek yang dikenakan dan pembayaran pajak tidak menurunkan kemampuan usaha dalam kegiatan produksi barang dan jasa mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju dan butir ini memiliki total skor yang tinggi dari pernyataan yang lainnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa responden merasa pemerintah telah adil dalam menentukan tarif pajak dan ketentuannya sehingga responden tidak merasa berat dengan pembayaran pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Pernyataan-pernyataan ini mewakili indikator yang diadopsi dari jurnal Rantung dan Adi (2009),

Selain itu, dengan adanya inovasi-inovasi dalam sistem perpajakan seperti sistem administrasi berbasis *online* responden tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, hal ini tercermin pada butir 23 yang kebanyakan responden menjawab setuju bahwa sistem *online* lebih efektif dan efisien, pernyataan-pernyataan ini mewakili indikator yang diadopsi dari jurnal Widayati dan Nurlis (2010).

4. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Pada pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji-F, diperoleh nilai F hitung 15,544 pada tingkat signifikansi 0,000, nilai ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen kesadaran membayar wajib pajak (X_1), pengetahuan sanksi perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas

efektivitas sistem perpajakan (X_3) mempengaruhi variabel dependen kemauan membayar pajak (Y).

Kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan merupakan tiga perilaku dasar seorang individu memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran membayar pajak membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas. Pembayaran pajak didasarkan atas dorongan dalam diri menyadari fungsi dan kegunaan pajak. Kemauan membayar pajak tidak terlepas dari tingkat pengetahuan seseorang mengenai pajak, dalam hal ini sanksi perpajakan dimana seseorang mengetahui bahwa jika dia tidak membayar pajak akan dikenakan hukuman maka dia akan membayarkan pajaknya karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena didorong oleh rasa senang dan hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak, perilaku ini akan berubah apabila petugas yang di jadikan pedoman tidak menunjukkan kinerja yang baik, kemauan masyarakat akan menurun. Penilaian yang diberikan tergantung pada kinerja dan upaya pemerintah itu sendiri dalam membangun citra pemerintah yang baik dan berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran membayar pajak (X1) , pengetahuan sanksi perpajakan (X2), dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3) terhadap kemauan membayar pajak (Y). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah maka semakin tinggi kemauan membayar pajak.
2. Tidak terdapatnya pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Tingkat pendidikan yang diterima tidak menjamin seseorang akan lebih mengetahui mengenai peraturan sanksi perpajakan meskipun tingkat pendidikannya tinggi.
3. Terdapat pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik penilaian yang diberikan wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan maka semakin besar pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak. dapat diartikan tinggi atau rendahnya tingkat kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil dan menengah dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi penelitian, yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak merupakan faktor pendorong yang timbul dari dalam diri, kesadaran akan timbul disaat wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk dirinya sendiri dan seluruh masyarakat, dengan pajak segala pembangunan dan peningkatan kesejahteraan semakin berjalan, termasuk pembangunan fasilitas bagi UKM, UKM sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia jika dengan didukung dengan tingkat kesadaran membayar pajak yang tinggi sehingga mendorong kemauan membayar pajak juga tinggi maka penerimaan pajak negara akan meningkat seimbang dengan terus bertambahnya PDB negara dari UKM. Hal ini harus dipertahankan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti

Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar kesadaran akan pajak tetap tinggi dan pandangan terhadap pajak semakin baik dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah.

2. Pengetahuan merupakan salah satu penyebab atau alasan wajib pajak memenuhi atau justru mencoba untuk menghindari pembayaran pajak, dalam hal ini pengetahuan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak, tidak perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini.
3. Penilaian wajib pajak kepada aparat perpajakan semakin menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan atas kinerja aparat perpajakan semakin baik, wajib pajak pemilik usaha lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya, wajib pajak tidak merasa diberatkan dengan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan dengan adanya inovasi-inovasi atas fasilitas perpajakan yang semakin memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sudah tidak perlu mendatangi kantor pajak untuk memperoleh informasi perpajakan terbaru karena dapat diakses melalui *website* pajak dan mendaftarkan NPWP karena dapat dilakukan secara *online* melalui sistem *e-regsiter*. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui sistem *e-banking* memudahkan wajib pajak membayarkan pajaknya. Hal ini membuktikan bahwa kinerja

perpajakan telah mengalami banyak perbaikan dan semakin serius dalam menangani kekurangan dimasa lalu.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari pemilik usaha kecil dan menengah di wilayah Bandung yang terdaftar di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), sehingga hasil penelitian belum mewakili wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Bagi penelitian selanjutnya, lebih memperluas wilayah yang akan dijadikan sampel kepada pemilik usaha kecil dan menengah di seluruh Jawa Barat sehingga hasil penelitian lebih mewakili jumlah pemilik usaha di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya lebih memperhatikan pemilihan waktu untuk penyebaran kuesioner minimal lebih dari satu bulan apabila wilayah penyebarannya diluar wilayah tempat tinggal peneliti dan kuesioner diberikan melalui lembaga terkait, karena proses penerimaan dan pengembalian kuesionernya membutuhkan waktu lebih lama
3. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen (pengetahuan sanksi perpajakan) yang tidak signifikan, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel lain yang lebih dapat

menjelaskan dan mempengaruhi variabel kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil dan menengah

4. Pada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada pengusaha kecil dan menengah yang melakukan pembukuan secara lengkap standar akuntansi agar terlihat tingkat laba yang didapatkan dari kegiatan usaha
5. Bagi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan agar kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya semakin tinggi dan diharapkan aparat perpajakan lebih aktif dan sigap meningkatkan kegiatan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga akan membentuk citra perpajakan semakin baik di pandangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2003. **Psikologi Umum**. Jakarta: PT RinekaCipta
- Agoes, Sukrisno dan Jan Hoesada. 2012. **Bunga Rampai Auditing Edisi 2**. Jakarta: SALEMBA EMPAT
- Anisah, Suci, Junaidi dkk. "Pengaruh Kesadaran, Kepatuhan dan Kemampuan Ekonomi Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PBB di Kabupaten Sumenep". Jurnal: Perpajakan 2013
- Arum, harjanti Puspa dan Zulaikha. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1 No 1. Hal 1-8. 2012
- Budi, Chandra. 2013. **Jutaan UMKM Pahlawan Pajak: Urus Pajak itu Sangat Mudah**. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Burton, Richard, Wiraman B Ilyas. 2001. **Hukum Pajak**. Jakarta: SALEMBA EMPAT
- Bruno, S Frey dan Benno Torgler. *Tax Morale and Conditional Cooperation*. Journal of Comparative Economics 35. PP 136–159. 2007
- Cummings, G. Ronald, Jorge Martines Vazquez et.al. *Effects of Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidance* 2005
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. **Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu**. Jakarta: Kencana
- Djumena, Erlangga. 2013. Pajak UKM, Nasib 55 Juta Usaha.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/28/0726280/Pajak.UKM.Nasib.55.Juta.Usaha> (diakses tanggal 13 Maret 2014)

Edo, Muhammad, Yunilma dan Daniati."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan KPP Padang".Jurnal: Perpajakan. 2012.

Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin."Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi WajibPajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak".*Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1.No.2 hal 1-15. 2012

Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting."Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Student Petra*.Vol 1. 2013

Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19**. Semarang: UNDIP

Gibson , James L. 1994. **Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses**. Jakarta: Erlangga

Gunadi, Djoned. 2005. **Administrasi Pajak**. Jakarta: BPPK DEPKEU RI

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3. No 1. November 2011

Indrakusuma, Arieyani Widyarti dan Herniwati Retno Handayani. "Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang", 2011, hal. 1-25.

Kartono, Liek Kartini. 1996. **Psikologi Umum**. Bandung: Mandar Maju

Permadi, Tedi, Azwir Nasir dan Yuneita Anisma."Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.Jurnal Ekonomi Universitas Riau. Vol 21. No 2. Juni 2013

Pratiwi, Agung Mas, dan Putu Ery Setiawan."Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada KepatuhanWajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2. ISSN: 2302-8556. 2014

Larasati, Ratih Amelia." Persepsi Pengurus atas Pelayanan, Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI Tegal. *Accounting Analysis Journal* 2 (2). 2013

Mardiasmo. 2011. **Perpajakan Edisi Revisi 2011**. Yogyakarta: ANDI

Modul SPSS statistiks. Pusat Pengembangan Teknologi Infromasi, UNJ

Muljono, Djoko. 2010. **Hukum Pajak: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis**. Yogyakarta: ANDI

Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. **Pendekatan Populer dan Praktis EKONOMETRIKA untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan**. Jakarta: Lembaga Penerbit UI FE.

Nugroho, Rahman Adi dan Zulaikha."Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accouting*. Vol 1. No 2. 2012

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi. 2012. Universitas Negeri Jakarta

Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. 2013. Jakarta: IAI

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. **Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal**. Yogyakarta: GrahaIlmu

- Rantung, Tatiana Vanesa, Priyo. "Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak: KPP Salatiga". Jurnal: Seminar Nasional Perpajakan II. 2009
- Robbins, Stephen P. 2008. **Perilaku Organisasi Buku 1**. Jakarta: Salemba Empat
- Rohman, Abdul, Zulaikha dan Shiddiq dkk. "Kajian terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak". 2011
- Sarwino, Sarlito W. 2010. **Pengantar Psikologi Umum**. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sapriadi, Doni. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (selupu Rejang)". Jurnal. 2013
- Setyonugroho, Hariyadi. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya". 2012
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2009. **Research Method for Business: A Skill Building Approach Fifth Edition**. United Kingdom: WILEY
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. **Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2009. **Hukum Pajak**. Jakarta: SALEMBA EMPAT
- _____. 2011. **Perencanaan Pajak**. Jakarta: SALEMBA EMPAT
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: ALFABETA
- Sumanto. 2014. **PSIKOLOGI UMUM**. Yogyakarta: CAPS

Suryadi.” Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur”. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4 No 1. Hal 105-121. 2006

Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta.”Pengaruh Kesadaran WajibPajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntanblitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2. ISSN: 2302-8556. 2013

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Jakarta: IAI

Tiraada, Tryana A.M.”Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. Vol 1. No 3. Hal 999-1008. 2013

Wertenbroch, Klaus and Bernd Skiera.*Measuring Consumers Willingness to Pay at The Point of Purchase. Journal of Marketing Research*. Vol 39. Pp 228-241. 2002

Widayari, Nurlis.”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas: KPP Pratama Gambir Tiga”. *Jurnal: SNA XIII*. 2010

Winerungan, Oktaviane Lidya.”Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan Bitung” *Jurnal EMBA*: Vol 1. No 3. Hal.960-970. November 2013

www.depkop.go.id



www.fiskal.depkeu.go.id

Yildirum, Kursad E dan Comakh Safak E.” A Research on Consciousness of Tax Payers About Environmental Tax in Erzurum”. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, ISSN 1548-6583. Vol. 9, No. 12, 1687-1694. 2013.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Surat permohonan Observasi Penelitian Skripsi

 <p><i>Building Future Leaders</i></p>	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486 Laman : www.unj.ac.id</p>
<p>Nomor : 0732/UN39.12/KM/2014 Lamp. : - Hal : Permohonan Izin Penelitian untuk Skripsi</p>	<p>17 Maret 2014</p>
<p>Yth. Kepala Divisi Umum LPDB</p>	
<p>Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :</p>	
<p>Nama : Sonia Dwi Utami Nomor Registrasi : 8335108427 Program Studi : Akuntansi Fakultas : Ekonomi Untuk Mengadakan : Penelitian untuk Skripsi</p>	
<p>Di : LPDB – KUMKM, Gd. LPDB, Jl. M.T. Haryono, Kav.52-53, Pancoran, Jakarta Selatan 12770</p>	
<p>Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul: "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah"</p>	
<p>Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.</p>	
	<p>Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan,</p>
<p>Tembusan : 1. Dekan Fakultas Ekonomi 2. Kaprog / Jurusan Akuntansi</p>	 <p>Drs. Syaifullah NIP 195702161984031001</p>

Lampiran 2

Surat balasan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)

Kepada Yth. : DIREKTUR UTAMA
LPDB-KUMKM
di-
Tempat

Telah Terima Dari : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA, PROV.DKI JAKARTA
No Surat : 0732/UN39.12/KM/2014 17/3/2014
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI
:

Yang Menyerahkan

(SONIA DWI UTAMI)

JAKARTA, 19 MARET 2014. PKL. 11.50
Yang Menerima

(KORNELIS UMBU KUDU)

No.Telp : Mahasiswi : 087883864619
Catatan : -
: -
: -

Jl. Letjend. M.T. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770 Kotak Pos 4370, Telp.021-7990756, Fax. 021-7989746
Website : www.danabergulir.com Email : info@danabergulir.com

Lampiran 3

Kuesioner penelitian

Jakarta, April 2014

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Ditempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswi Program Studi Akuntansi (S1), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang pada saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir (skripsi).

Nama : Sonia Dwi Utami

No.Reg : 8335108427

Dalam penyusunan skripsi ini, saya berharap Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama surat ini. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu.

Pernyataan-pernyataan dibawah ini merupakan pengukuran untuk mengetahui “**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah**”. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas seluruh jawaban Bapak/Ibu. Peneliti mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atas kuesioner ini. Atas perhatian dan kerjasama, peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Hormat saya,

Sonia Dwi Utami

A. Identitas Responden

- Nama : _____ (boleh tidak diisi)
- Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*
- Usia : 25 – 35 thn 36 – 45 thn 46-55 thn
 > 55 thn
- Lama Mendirikan Usaha (thn) : < 5 thn 5 – 10 thn > 10 thn
- Peredaran omzet : 100 – 250 jt 250 – 500 jt > 500 jt
- Bentuk Usaha : Perorangan CV PT
- Memiliki NPWP : Ya Tidak
- Pendidikan akhir : SD/SMP/SMA/ sederajat/Akademik (I/II/III)/S1/S2/S3*
- Pembayaran pajak melalui : Bank Pos Lainnya
- Pengetahuan pajak diperoleh : Media elektronik Media cetak
 Sosialisasi pajak Lainnya

Keterangan: Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner dapat memberikan tanda \surd /x untuk setiap pilihan jawaban pada kolom yang telah disediakan, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | | | |
|----|---|---------------|-----|---|---------------------|
| SS | = | Sangat setuju | TS | = | Tidak setuju |
| S | = | Setuju | STS | = | Sangat tidak setuju |
| RR | = | Ragu-ragu | | | |

Tanggal Pengisian: _____

Tanda Tangan,

*Coret yang tidak perlu

B. Daftar Pernyataan

1. Pernyataan Kesadaran Membayar Pajak

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Saya menyadari bahwa menunda pembayaran pajak sama dengan menghambat berjalannya pemungutan pajak					
2	Saya mengetahui bahwa pembayaran pajak ditetapkan oleh undang-undang					
3	Saya menyadari pengetahuan perpajakan yang memadai menghilangkan keraguan membayar pajak					
4	Saya menyadari bahwa pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan dalam negeri					
5	Saya menyadari bahwa menanggung pembayaran pajak merugikan semua pihak (saya dan negara)					
6	Saya memperoleh pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi					
7	Saya memperoleh informasi perpajakan melalui media massa					
8	Saya memperoleh pendidikan perpajakan melalui pelatihan					

2. Pernyataan Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
9	Saya mengetahui sanksi administrasi yang diberikan fiskus kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak					
10	Pengusaha sengaja tidak mendaftarkan usahanya dikenakan pidana penjara min 6 bulan maks 6 tahun					
11	Saya mengetahui bahwa sanksi bunga 2% dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak					
12	Saya mengetahui kelpasan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dikenakan sanksi pidana kurungan min 1 tahun					
13	Saya mengetahui sanksi kenaikan tarif 50% diberikan wajib pajak yang tidak menyalenggarakan pembukuan					
14	Saya mengetahui percobaan penyalahgunaan tanpa hak NPWP mengajukan pengkreditan beban pajak akan di pidanakan					
15	Saya mengetahui denda kesengajaan penerbitan faktur pajak tanpa berdasarkan transaksi dikenakan 2x jumlah pembayaran					
16	Saya mengetahui menerbitkan faktur pajak belum dikukuhkan pengusaha kena pajak dijatuhi pidana penjara minimal 2 tahun					

3. Pernyataan Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
17	Saya mengetahui pemerintah telah menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan objek yang dikenakan					
18	Alokasi pemanfaatan dana pajak sudah tepat sasaran sesuai dengan program kerja pemerintah					
19	Saya belum merasakan adanya diskriminasi pelayanan pajak antar kelas masyarakat					
20	Saya mengetahui bahwa pelayanan yang diberikan petugas pajak sudah memenuhi standart kualitas pelayanan					
21	Kemampuan ekonomi saya masih berkecukupan setelah dikurangi pembayaran pajak					
22	Pembayaran pajak tidak menurunkan kemampuan usaha saya dalam kegiatan produksi barang jasa					
23	Penggunaan e-register memudahkan wajib pajak baru mendaftarkan diri tanpa mendatangi kantor pajak					

4. Pernyataan Kemauan Membayar Pajak

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
24	Saya melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan untuk membayar pajak sebelum melakukan pembayaran					
25	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara untuk melakukan pembayaran pajak					
26	Sebagai warga negara yang baik saya berusaha untuk membayarkan pajak tepat waktu					
27	Saya mengalokasikan dana khusus untuk pembayaran pajak					
28	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai syarat kelengkapan dokumen					
29	Proses pembayaran yang mudah menimbulkan semangat saya untuk selalu membayar pajak					
30	Sebagai pengusaha saya harus mendaftarkan usaha ke kantor pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP					
31	Saya menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai dengan tarif yang berlaku					
32	Sebagai warga negara yang baik saya berusaha untuk membayarkan pajak tepat waktu					

Lampiran 4

Data Excel butir pernyataan

Kesadaran membayar wajib pajak (X1)									Sanksi Perpajakan (X2)								
1	2	3	4	5	6	7	8	Total	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
4	4	4	4	4	3	4	3	30	5	5	4	4	4	4	4	4	34
4	4	4	5	5	4	4	5	35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	5	5	5	35	3	4	3	4	3	5	5	5	32
4	4	4	4	4	2	4	2	28	4	4	3	3	3	3	4	3	27
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4	4	4	4	4	4	5	4	33
5	4	4	4	3	2	4	2	28	4	5	5	4	4	4	3	3	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	5	4	4	3	4	32
4	4	4	5	3	3	3	4	30	3	2	4	4	3	2	4	2	24
4	4	3	2	4	2	5	2	26	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	2	4	4	4	5	4	3	30	4	1	5	3	4	2	4	3	26
4	4	4	5	5	4	4	4	34	4	4	3	4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	2	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	5	5	5	4	4	5	37	3	4	4	4	4	4	4	4	31
5	4	4	4	3	2	2	2	26	4	4	4	3	4	3	4	4	30
4	4	4	4	4	4	4	2	30	4	4	4	3	3	4	3	3	28
4	5	4	3	3	4	2	1	26	3	4	5	4	3	4	3	5	31
5	5	4	5	5	3	4	2	33	3	3	4	3	3	4	3	4	27
4	4	4	4	4	3	3	2	28	3	3	4	3	4	4	3	3	27
4	3	4	4	5	3	3	4	30	4	4	3	4	5	4	5	5	34
4	3	3	4	4	3	4	3	28	4	4	4	4	3	4	3	3	29
4	4	3	5	4	2	2	2	26	2	3	4	3	3	4	3	3	25
4	4	3	3	3	4	3	2	26	4	4	4	2	4	2	2	3	25
4	4	3	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	3	4	4	3	4	2	28	3	5	4	4	4	3	3	5	31
4	4	5	4	4	4	3	3	31	5	5	4	4	4	3	4	4	33
5	5	4	3	3	4	5	3	32	3	5	4	3	5	3	3	5	31
4	4	4	5	5	4	4	5	35	2	4	4	5	3	5	4	5	32
4	4	4	3	3	4	4	3	29	2	4	4	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	4	5	5	4	34	3	2	3	2	3	4	4	3	24
4	4	3	3	4	4	4	2	28	4	3	4	4	4	4	4	4	31
3	4	4	4	3	4	4	4	30	3	4	2	3	4	3	4	3	26
5	5	4	3	4	2	2	2	27	4	4	3	4	4	4	4	4	31
4	4	4	5	5	4	4	3	33	2	4	3	4	4	3	4	3	27
4	4	4	4	5	4	4	2	31	4	4	4	4	3	4	4	4	31
4	4	4	4	3	4	2	4	29	4	5	3	4	5	4	3	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	3	4	3	5	3	5	32

4	4	5	4	4	4	4	3	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	5	4	3	3	5	4	5	33
5	5	5	4	3	5	2	2	31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	3	3	3	3	3	2	25	3	5	5	4	4	4	3	3	31
5	4	5	4	4	3	3	2	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	4	4	3	36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	3	5	4	3	2	2	26	4	4	3	4	4	4	4	4	31
5	4	4	4	4	4	4	4	33	4	5	4	4	5	4	4	5	35
5	5	4	4	4	4	4	2	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	4	5	5	3	3	3	33	3	4	4	3	4	4	4	4	30
4	3	4	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	5	4	5	4	3	4	33	4	4	4	4	4	3	3	4	30
5	5	5	4	5	2	4	2	32	4	5	3	3	3	4	4	5	31
4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	5	4	4	5	4	4	5	35
4	4	4	3	3	3	3	3	27	4	4	4	3	4	4	4	3	30
4	4	4	4	3	3	3	3	28	4	3	3	3	3	3	3	4	26
5	5	3	5	5	5	5	3	36	4	4	2	3	2	2	2	4	23
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	3	5	4	3	3	31
5	3	4	3	5	5	5	3	33	4	5	5	3	3	4	3	4	31
4	4	4	4	4	4	4	3	31	3	5	4	4	4	5	3	5	33
4	4	3	5	4	4	4	3	31	3	3	4	3	3	4	3	4	27
4	4	3	4	4	3	4	3	29	3	4	4	3	4	3	3	4	28
4	4	3	4	4	4	4	3	30	4	5	3	4	3	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	2	30	4	5	3	4	5	3	4	4	32
5	4	3	5	3	4	4	3	31	5	4	3	4	3	5	5	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	5	3	5	3	4	31
4	4	3	4	5	4	4	3	31	4	3	4	4	4	3	3	3	28
4	5	4	4	3	4	3	2	29	4	5	3	3	4	4	3	5	31
4	4	4	5	4	3	4	3	31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	3	4	3	4	4	2	28	4	4	3	4	4	4	3	5	31
4	4	5	4	5	3	4	3	32	3	3	3	4	3	3	3	3	25
4	4	4	4	4	3	4	2	29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	5	3	4	2	2	28	3	3	4	4	3	4	3	3	27
4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	3	4	4	3	2	4	4	28
5	5	5	4	4	3	5	4	35	3	4	3	3	3	3	3	4	26
4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	5	4	3	3	4	5	4	32
4	3	3	3	3	4	3	4	27	4	3	4	3	3	3	3	4	27
4	4	4	4	4	4	5	5	34	3	4	3	5	4	4	4	4	31
4	4	5	4	4	4	4	4	33	4	4	4	5	5	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	5	5	5	5	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	5	5	5	35

5	5	5	4	4	5	4	5	37	4	4	4	4	5	5	5	5	36
5	5	4	4	4	2	4	2	30	4	4	4	3	4	3	3	3	28
4	5	5	5	5	4	4	4	36	3	4	3	4	3	4	5	5	31
4	4	4	4	5	4	5	4	34	4	4	4	4	5	4	5	4	34
5	4	5	5	4	4	2	2	31	3	4	4	5	4	5	3	5	33
4	4	4	5	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	5	4	33
5	4	4	5	5	4	4	2	33	4	3	3	4	3	5	4	5	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	5	4	4	5	34
2	4	4	5	4	4	1	1	25	2	4	4	3	3	4	2	4	26
4	4	4	4	4	3	4	3	30	4	4	4	4	5	4	4	4	33
4	4	5	5	4	4	4	4	34	2	2	5	3	5	5	5	5	32
4	4	4	5	4	4	4	2	31	4	4	4	3	4	4	4	4	31
4	3	3	5	4	2	4	2	27	4	3	4	4	3	3	3	3	27
5	4	4	4	5	5	4	4	35	5	5	4	5	4	5	4	5	37
4	5	4	4	4	3	4	2	30	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	4	5	4	4	3	4	2	30	4	4	4	3	4	4	3	3	29
4	4	3	4	3	5	4	3	30	3	2	4	5	5	4	3	4	30
5	5	5	5	5	4	4	1	34	4	4	4	3	4	3	3	3	28
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	5	4	4	5	4	34
4	4	4	4	4	5	4	2	31	2	4	4	3	5	5	4	4	31
4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	4	4	3	4	3	4	3	29
4	4	3	3	4	4	3	4	29	4	4	4	4	3	4	4	3	30
4	4	3	4	5	3	4	2	29	4	5	3	4	3	4	4	5	32
4	4	4	4	4	4	4	2	30	4	3	3	4	4	4	3	3	28
4	4	3	4	3	4	3	3	28	4	4	4	4	4	4	4	3	31
4	4	4	4	5	4	5	4	34	4	4	4	4	4	5	4	5	34
4	4	3	4	3	2	3	2	25	4	3	4	4	3	3	3	3	27
4	4	4	4	3	2	2	2	25	4	3	3	4	4	4	3	3	28
3	4	3	3	3	2	2	2	22	4	3	4	3	4	4	4	4	30
3	3	3	4	4	4	3	4	28	3	3	3	4	4	3	4	3	27
4	4	4	3	4	3	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	5	4	3	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	3	4	4	4	4	3	31	5	4	4	4	3	4	4	4	32
4	4	4	5	3	4	2	2	28	3	3	4	3	3	4	3	3	26
3	5	3	4	3	2	4	2	26	3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	5	1	3	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	3	4	4	3	4	2	29	3	4	4	3	3	4	4	4	29
4	4	3	4	4	3	4	3	29	3	3	3	3	3	4	3	3	25
4	4	5	5	4	2	4	2	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	2	4	5	2	2	27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	5	5	5	4	4	3	34	5	4	3	4	5	4	4	5	34

4	4	5	4	5	4	3	2	31	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	5	4	4	4	3	4	2	30	4	4	3	4	4	4	3	3	29
665	666	636	665	654	589	594	489		601	610	602	605	605	614	594	624	

4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	3	4	3	4	3	4	3	32
4	3	3	3	4	4	4	25	5	5	4	5	4	4	5	4	5	41
4	3	3	3	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	3	4	5	3	4	4	3	34
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	2	3	3	4	4	5	25	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	3	4	3	5	5	5	3	36
4	3	4	3	4	4	4	26	5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	4	4	5	38
3	3	4	4	4	4	3	25	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
2	2	4	2	4	3	3	20	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	4	4	4	4	4	5	36
2	1	5	5	5	5	5	28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
4	5	3	4	5	5	4	30	3	4	5	3	4	4	3	4	5	35
5	3	3	4	4	3	4	26	4	3	5	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	5	4	5	31	4	4	3	3	5	2	4	4	3	32
4	3	4	3	4	4	5	27	5	3	4	4	4	4	4	4	5	37
4	3	3	3	4	4	4	25	5	3	4	4	4	3	4	4	5	36
4	3	2	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	3	3	5	3	4	3	26	4	5	4	4	5	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	5	5	5	4	4	4	4	39
5	3	2	3	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	3	4	5	36
5	2	4	3	4	4	3	25	4	4	5	4	5	4	4	4	5	39
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	5	5	4	3	4	4	4	37
4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	3	4	5	4	4	4	3	35
4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	5	4	4	4	5	39
5	3	4	4	4	4	4	28	5	4	3	4	4	4	4	4	3	35
4	3	2	4	4	4	5	26	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39
5	5	4	3	5	5	4	31	5	5	4	5	5	5	4	4	5	42
3	3	4	3	3	4	3	23	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
5	5	4	4	4	4	5	31	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
3	3	3	4	4	3	4	24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
3	4	4	4	4	4	3	26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	5	5	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	5	5	4	30	4	4	5	4	5	4	4	4	5	39
4	4	4	4	5	5	4	30	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
3	4	4	4	4	5	4	28	4	4	4	4	5	4	4	4	5	38
4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	4	4	4	32	4	4	4	4	5	4	5	4	5	39

4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	3	3	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	3	2	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	4	4	3	4	3	3	25	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	4	4	3	4	3	3	25	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	4	4	3	4	3	3	25	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39
2	2	2	3	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	3	3	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	3	3	4	4	4	26	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
4	3	2	3	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	4	4	4	4	5	4	5	39
5	4	4	4	4	5	5	31	4	4	5	4	5	4	5	4	5	40
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
4	4	4	4	5	5	4	30	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
5	4	4	5	4	4	3	29	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39
5	3	2	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	5	4	4	5	5	4	31	4	4	5	4	4	4	4	5	5	39
5	3	4	4	4	4	5	29	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
4	2	3	4	3	3	4	23	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
4	1	1	2	3	4	4	19	4	4	4	3	4	3	3	4	4	33
3	2	3	3	4	4	4	23	3	3	3	3	4	3	5	4	4	32
3	1	3	2	4	4	4	21	4	4	4	4	4	3	4	3	4	34
2	2	2	3	4	2	4	19	4	4	4	2	4	2	3	4	4	31
4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	2	4	2	4	4	2	20	4	4	4	2	4	4	4	2	5	33
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
3	3	3	3	4	4	5	25	5	4	5	4	4	4	5	4	5	40
4	4	4	4	5	5	4	30	4	5	4	4	5	4	5	4	4	39
5	4	4	5	4	4	3	29	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39
5	3	2	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	3	4	4	5	4	3	27	4	4	5	4	4	4	4	5	5	39
5	3	4	4	4	4	5	29	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
4	2	3	4	3	3	4	23	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
4	4	4	3	4	3	3	25	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39
2	2	2	3	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	3	3	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	3	3	4	4	4	26	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
649	557	576	595	637	647	632		669	652	679	657	685	646	663	658	710	

Lampiran 5

Output SPSS Uji Validitas

		Correlations																	
		butir1	butir2	butir3	butir4	butir5	butir6	butir7	butir8	butir9	butir10	butir11	butir12	butir13	butir14	butir15	butir16	butir17	skortotal
butir1	Pearson Correlation	1	,376	,139	,125	-,030	,083	-,008	-,167	-,088	,008	-,160	-,416	,015	-,179	-,026	,162	-,079	,078
	Sig. (2-tailed)		,102	,559	,599	,902	,729	,973	,481	,711	,973	,500	,068	,949	,451	,913	,496	,741	,743
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir2	Pearson Correlation	,376	1	,844**	,624**	,790**	,404	,574**	,269	,510*	,624**	-,563**	-,668**	-,462*	-,627**	-,571**	,273	-,622**	,582**
	Sig. (2-tailed)	,102		,000	,003	,000	,078	,008	,252	,021	,003	,010	,001	,040	,003	,009	,244	,003	,007
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir3	Pearson Correlation	,139	,844**	1	,604**	,800**	,547**	,430	,281	,327	,632**	-,501*	-,555*	-,330	-,489*	-,489*	,181	-,449*	,682**
	Sig. (2-tailed)	,559	,000		,005	,000	,013	,059	,230	,160	,003	,024	,011	,155	,029	,029	,446	,047	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir4	Pearson Correlation	,125	,624**	,604**	1	,606**	,605**	,366	,131	,432	,457*	-,295	-,504*	-,292	-,591**	-,672**	,316	-,415	,601**
	Sig. (2-tailed)	,599	,003	,005		,005	,005	,113	,581	,057	,043	,207	,024	,212	,006	,001	,175	,069	,005
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir5	Pearson Correlation	-,030	,790**	,800**	,606**	1	,349	,582**	,294	,577**	,539*	-,486*	-,441	-,509*	-,480*	-,563**	,137	-,472*	,613**
	Sig. (2-tailed)	,902	,000	,000	,005		,132	,007	,208	,008	,014	,030	,052	,022	,032	,010	,566	,035	,004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir6	Pearson Correlation	,083	,404	,547**	,605**	,349	1	,284	,414	,352	,404	-,427	-,149	-,434	-,476*	-,619**	,570**	-,007	,752**
	Sig. (2-tailed)	,729	,078	,013	,005	,132		,225	,069	,128	,077	,060	,531	,056	,034	,004	,009	,978	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir7	Pearson Correlation	-,008	,574**	,430	,366	,582**	,284	1	,164	,709**	,404	-,373	-,157	-,422	-,752**	-,650**	,185	-,341	,415
	Sig. (2-tailed)	,973	,008	,059	,113	,007	,225		,490	,000	,078	,105	,510	,064	,000	,002	,434	,142	,069
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir8	Pearson Correlation	-,167	,269	,281	,131	,294	,164	1	,483*	,172	-,247	-,152	-,851**	,027	-,220	,666**	,086	,666**	
	Sig. (2-tailed)	,481	,252	,230	,581	,069	,490		,031	,468	,294	,522	,000	,909	,352	,001	,719	,001	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
butir9	Pearson Correlation	-,088	,510*	,327	,432	,577**	,352	,709**	,483*	1	,396	-,374	-,275	-,770**	-,549*	-,617**	,398	-,480*	,465**
	Sig. (2-tailed)	,711	,021	,160	,057	,008	,128	,000	,031		,084	,104	,240	,000	,012	,004	,082	,032	,039
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir10	Pearson Correlation	,008	,624**	,632**	,457*	,539*	,404	,404	,172	,396	1	-,532*	-,672**	-,176	-,677**	-,306	-,051	-,456*	,330
	Sig. (2-tailed)	,973	,003	,003	,043	,014	,077	,078	,468	,084		,016	,001	,459	,001	,190	,832	,044	,155
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir11	Pearson Correlation	-,160	-,563**	-,501*	-,295	-,486*	-,427	-,373	-,247	-,374	-,532*	1	,552*	,427	,355	,259	-,163	,151	-,229
	Sig. (2-tailed)	,500	,010	,024	,207	,030	,060	,105	,294	,104	,016		,012	,061	,124	,270	,492	,525	,332
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir12	Pearson Correlation	-,416	-,668**	-,555*	-,504*	-,441	-,149	-,157	-,152	-,275	-,672**	,552*	1	,241	,417	,090	-,080	,480*	-,191
	Sig. (2-tailed)	,068	,001	,011	,024	,052	,531	,510	,522	,240	,001	,012		,306	,067	,705	,739	,032	,419
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir13	Pearson Correlation	,015	-,462*	-,330	-,292	-,509*	-,434	-,422	-,851**	-,770**	-,176	,427	,241	1	,207	,452*	-,657**	,144	-,620**
	Sig. (2-tailed)	,949	,040	,155	,212	,022	,056	,064	,000	,000	,459	,061	,306		,382	,045	,002	,544	,004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir14	Pearson Correlation	-,179	-,627**	-,489*	-,591**	-,480*	-,476*	-,752**	,027	-,549*	-,677**	,355	,417	,207	1	,701**	-,182	,423	-,362
	Sig. (2-tailed)	,451	,003	,029	,006	,032	,034	,000	,909	,012	,001	,124	,067	,382		,001	,443	,063	,117
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir15	Pearson Correlation	-,026	-,571**	-,489*	-,672**	-,583**	-,619**	-,650**	-,220	-,617**	-,306	,259	,090	,452*	,701**	1	-,441	,333	-,572**
	Sig. (2-tailed)	,913	,009	,029	,001	,010	,004	,002	,352	,004	,190	,270	,705	,045	,001		,052	,152	,008
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir16	Pearson Correlation	,162	,273	,181	,316	,137	,570**	,185	,666**	,398	-,051	-,163	-,080	-,657**	-,182	-,441	1	-,013	,665**
	Sig. (2-tailed)	,496	,244	,446	,175	,566	,009	,434	,001	,082	,832	,492	,739	,002	,443	,052		,957	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir17	Pearson Correlation	-,079	-,622**	-,449*	-,415	-,472*	-,007	-,341	,086	-,480*	-,456*	,151	,480*	,144	,423	,333	-,013	1	-,092
	Sig. (2-tailed)	,741	,003	,047	,069	,035	,978	,142	,719	,032	,044	,525	,032	,544	,063	,152	,957		,700
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
skortotal	Pearson Correlation	,078	,582**	,682**	,601**	,613**	,752**	,415	,666**	,465*	,330	-,229	-,191	-,620**	-,362	-,572**	,665**	-,092	1
	Sig. (2-tailed)	,743	,007	,001	,005	,004	,000	,069	,001	,039	,155	,332	,419	,004	,117	,008	,001	,700	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		butir18	butir19	butir20	butir21	butir22	butir23	butir24	butir25	butir26	butir27	butir28	skortotal
butir18	Pearson Correlation	1	,648**	,728**	,517*	,424	,472*	,503*	,524*	-,383	-,273	-,188	,718**
	Sig. (2-tailed)		,002	,000	,020	,063	,035	,024	,018	,096	,244	,428	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir19	Pearson Correlation	,648**	1	,728**	,678**	,570**	,724**	,581**	,662**	-,230	-,125	-,188	,905**
	Sig. (2-tailed)	,002		,000	,001	,009	,000	,007	,001	,330	,598	,428	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir20	Pearson Correlation	,728**	,728**	1	,562**	,749**	,447*	,691**	,720**	-,421	-,375	-,258	,827**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,010	,000	,048	,001	,000	,065	,104	,273	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir21	Pearson Correlation	,517*	,678**	,562**	1	,553*	,650**	,621**	,728**	-,439	-,372	-,323	,749**
	Sig. (2-tailed)	,020	,001	,010		,011	,002	,003	,000	,053	,106	,165	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir22	Pearson Correlation	,424	,570**	,749**	,553*	1	,392	,642**	,673**	-,397	-,367	-,097	,737**
	Sig. (2-tailed)	,063	,009	,000	,011		,087	,002	,001	,083	,111	,683	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir23	Pearson Correlation	,472*	,724**	,447*	,650**	,392	1	,537*	,679**	-,343	-,379	-,504*	,683**
	Sig. (2-tailed)	,035	,000	,048	,002	,087		,015	,001	,139	,099	,024	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir24	Pearson Correlation	,503*	,581**	,691**	,621**	,642**	,537*	1	,834**	-,674**	-,385	-,206	,744**
	Sig. (2-tailed)	,024	,007	,001	,003	,002	,015		,000	,001	,094	,383	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir25	Pearson Correlation	,524*	,662**	,720**	,728**	,673**	,679**	,834**	1	-,675**	-,621**	-,460*	,747**
	Sig. (2-tailed)	,018	,001	,000	,000	,001	,001	,000		,001	,003	,042	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir26	Pearson Correlation	-,383	-,230	-,421	-,439	-,397	-,343	-,674**	-,675**	1	,722**	,510*	-,270
	Sig. (2-tailed)	,096	,330	,065	,053	,083	,139	,001	,001		,000	,022	,249
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir27	Pearson Correlation	-,273	-,125	-,375	-,372	-,367	-,379	-,385	-,621**	,722**	1	,688**	-,134
	Sig. (2-tailed)	,244	,598	,104	,106	,111	,099	,094	,003	,000		,001	,573
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir28	Pearson Correlation	-,188	-,188	-,258	-,323	-,097	-,504*	-,206	-,460*	,510*	,688**	1	-,066
	Sig. (2-tailed)	,428	,428	,273	,165	,683	,024	,383	,042	,022	,001		,782
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
skortotal	Pearson Correlation	,718**	,905**	,827**	,749**	,737**	,683**	,744**	,747**	-,270	-,134	-,066	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,249	,573	,782	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		butir29	butir30	butir31	butir32	butir33	butir34	butir35	butir36	butir37	butir38	butir39	butir40	butir41	butir42	butir43	skortotal
butir29	Pearson Correlation	1	,337	,469*	,515*	-,273	-,172	,495*	,027	,417	,019	,363	-,140	,118	,213	,410	,679**
	Sig. (2-tailed)		,147	,037	,020	,244	,468	,026	,910	,067	,935	,116	,555	,820	,367	,073	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir30	Pearson Correlation	,337	1	,624**	,309	-,586**	-,547*	,650**	-,408	,722**	-,163	,382	-,337	,626**	,292	,219	,517*
	Sig. (2-tailed)	,147		,003	,184	,007	,013	,002	,074	,000	,491	,097	,146	,003	,212	,353	,020
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir31	Pearson Correlation	,469*	,624**	1	,363	-,563**	-,461*	,713**	-,210	,727**	-,027	,416	-,197	,578**	,311	,154	,656**
	Sig. (2-tailed)	,037	,003		,116	,010	,041	,000	,374	,000	,909	,068	,404	,008	,183	,516	,002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir32	Pearson Correlation	,515*	,309	,363	1	-,568**	-,295	,414	-,395	,515*	-,453*	,327	-,510*	,304	,435	,355	,355
	Sig. (2-tailed)	,020	,184	,116		,009	,207	,069	,085	,020	,045	,160	,022	,193	,055	,125	,124
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir33	Pearson Correlation	-,273	-,586**	-,563**	-,568**	1	,748**	-,546*	,269	-,538*	,579**	-,544*	,754**	-,437	-,235	-,094	-,098
	Sig. (2-tailed)	,244	,007	,010	,009		,000	,013	,251	,014	,008	,013	,000	,054	,319	,694	,682
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir34	Pearson Correlation	-,172	-,547*	-,461*	-,295	,748**	1	-,476*	,031	-,493*	,512*	-,398	,642**	-,422	-,056	-,320	-,060
	Sig. (2-tailed)	,468	,013	,041	,207	,000		,034	,897	,027	,021	,082	,002	,064	,816	,168	,801
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir35	Pearson Correlation	,495*	,650**	,713**	,414	-,546*	-,476*	1	-,432	,641**	-,263	,296	-,406	,483*	,007	,259	,488*
	Sig. (2-tailed)	,026	,002	,000	,069	,013	,034		,057	,002	,263	,205	,076	,031	,976	,271	,029
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir36	Pearson Correlation	,027	-,408	-,210	-,395	,269	,031	-,432	1	-,423	,448*	-,155	,484*	-,368	-,069	-,037	-,018
	Sig. (2-tailed)	,910	,074	,374	,085	,251	,897	,057		,063	,048	,514	,031	,110	,773	,876	,941
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir37	Pearson Correlation	,417	,722**	,727**	,515*	-,538*	-,493*	,641**	-,423	1	-,047	,421	-,336	,700**	,421	,399	,689**
	Sig. (2-tailed)	,067	,000	,000	,020	,014	,027	,002	,063		,845	,064	,147	,001	,064	,081	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir38	Pearson Correlation	,019	-,163	-,027	-,453*	,579**	,512*	-,263	,448*	-,047	1	-,419	,832**	-,229	,074	-,027	,381
	Sig. (2-tailed)	,935	,491	,909	,045	,008	,021	,263	,048	,845		,066	,000	,331	,757	,911	,097
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir39	Pearson Correlation	,363	,382	,416	,327	-,544*	-,398	,296	-,155	,421	-,419	1	-,533*	,450*	,431	,015	,321
	Sig. (2-tailed)	,116	,097	,068	,160	,013	,082	,205	,514	,064	,066		,015	,047	,058	,948	,168
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir40	Pearson Correlation	-,140	-,337	-,197	-,510*	,754**	,642**	-,406	,484*	-,336	,832**	-,533*	1	-,331	-,089	-,193	,183
	Sig. (2-tailed)	,555	,146	,404	,022	,000	,002	,076	,031	,147	,000	,015		,155	,709	,415	,440
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir41	Pearson Correlation	,118	,626**	,578**	,304	-,437	-,422	,483*	-,368	,700**	-,229	,450*	-,331	1	,538*	,029	,506*
	Sig. (2-tailed)	,820	,003	,008	,193	,054	,064	,031	,110	,001	,331	,047	,155		,014	,904	,023
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir42	Pearson Correlation	,213	,292	,311	,435	-,235	-,056	,007	-,069	,421	,074	,431	-,089	,538*	1	,221	,581**
	Sig. (2-tailed)	,367	,212	,183	,055	,319	,816	,976	,773	,064	,757	,058	,709	,014		,349	,007
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir43	Pearson Correlation	,410	,219	,154	,355	-,094	-,320	,259	-,037	,399	-,027	,015	-,193	,029	,221	1	,408
	Sig. (2-tailed)	,073	,353	,516	,125	,694	,168	,271	,876	,081	,911	,948	,415	,904	,349		,074
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
skortotal	Pearson Correlation	,679**	,517*	,656**	,355	-,098	-,060	,488*	-,018	,689**	,381	,321	,183	,506*	,581**	,408	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,020	,002	,124	,682	,801	,029	,941	,001	,097	,168	,440	,023	,007	,074	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		butir44	butir45	butir46	butir47	butir48	butir49	butir50	butir51	butir52	butir53	butir54	skortotal
butir44	Pearson Correlation	1	,876**	,805**	,696**	,683**	,623**	-,316	-,322	,761**	,654**	,606**	,822**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,001	,003	,175	,166	,000	,002	,005	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir45	Pearson Correlation	,876**	1	,774**	,740**	,661**	,737**	-,473*	-,395	,768**	,805**	,590**	,806**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,002	,000	,035	,085	,000	,000	,006	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir46	Pearson Correlation	,805**	,774**	1	,676**	,801**	,801**	-,350	-,199	,909**	,732**	,640**	,891**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000	,000	,131	,401	,000	,000	,002	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir47	Pearson Correlation	,696**	,740**	,676**	1	,635**	,776**	-,303	-,093	,582**	,680**	,628**	,823**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001		,003	,000	,194	,697	,007	,001	,003	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir48	Pearson Correlation	,683**	,661**	,801**	,635**	1	,681**	-,345	-,123	,715**	,840**	,863**	,870**
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,000	,003		,001	,137	,605	,000	,000	,000	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir49	Pearson Correlation	,623**	,737**	,801**	,776**	,681**	1	-,345	-,281	,715**	,755**	,606**	,808**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	,001		,137	,231	,000	,000	,005	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir50	Pearson Correlation	-,316	-,473*	-,350	-,303	-,345	-,345	1	,745**	-,570**	-,448*	-,341	-,155
	Sig. (2-tailed)	,175	,035	,131	,194	,137	,137		,000	,009	,047	,141	,515
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir51	Pearson Correlation	-,322	-,395	-,199	-,093	-,123	-,281	,745**	1	-,427	-,250	-,204	,011
	Sig. (2-tailed)	,166	,085	,401	,697	,605	,231	,000		,060	,288	,389	,964
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir52	Pearson Correlation	,761**	,768**	,909**	,582**	,715**	,715**	-,570**	-,427	1	,695**	,505*	,735**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,007	,000	,000	,009	,060		,001	,023	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir53	Pearson Correlation	,654**	,805**	,732**	,680**	,840**	,755**	-,448*	-,250	,695**	1	,814**	,835**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,001	,000	,000	,047	,288	,001		,000	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir54	Pearson Correlation	,606**	,590**	,640**	,628**	,863**	,606**	-,341	-,204	,505*	,814**	1	,772**
	Sig. (2-tailed)	,005	,006	,002	,003	,000	,005	,141	,389	,023	,000		,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
skortotal	Pearson Correlation	,822**	,806**	,891**	,823**	,870**	,808**	-,155	,011	,735**	,835**	,772**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,515	,964	,000	,000	,000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6

Output SPSS Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,862	8

X1**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,926	8

X2**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,859	7

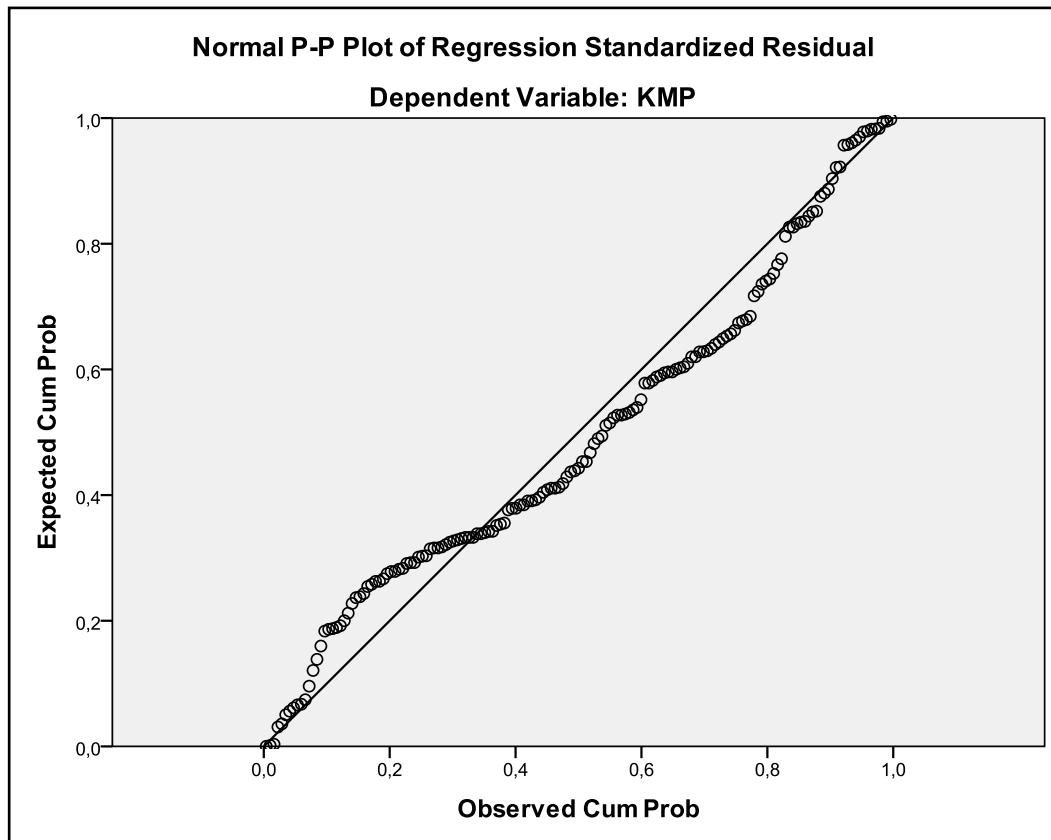
X3**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,955	9

Y

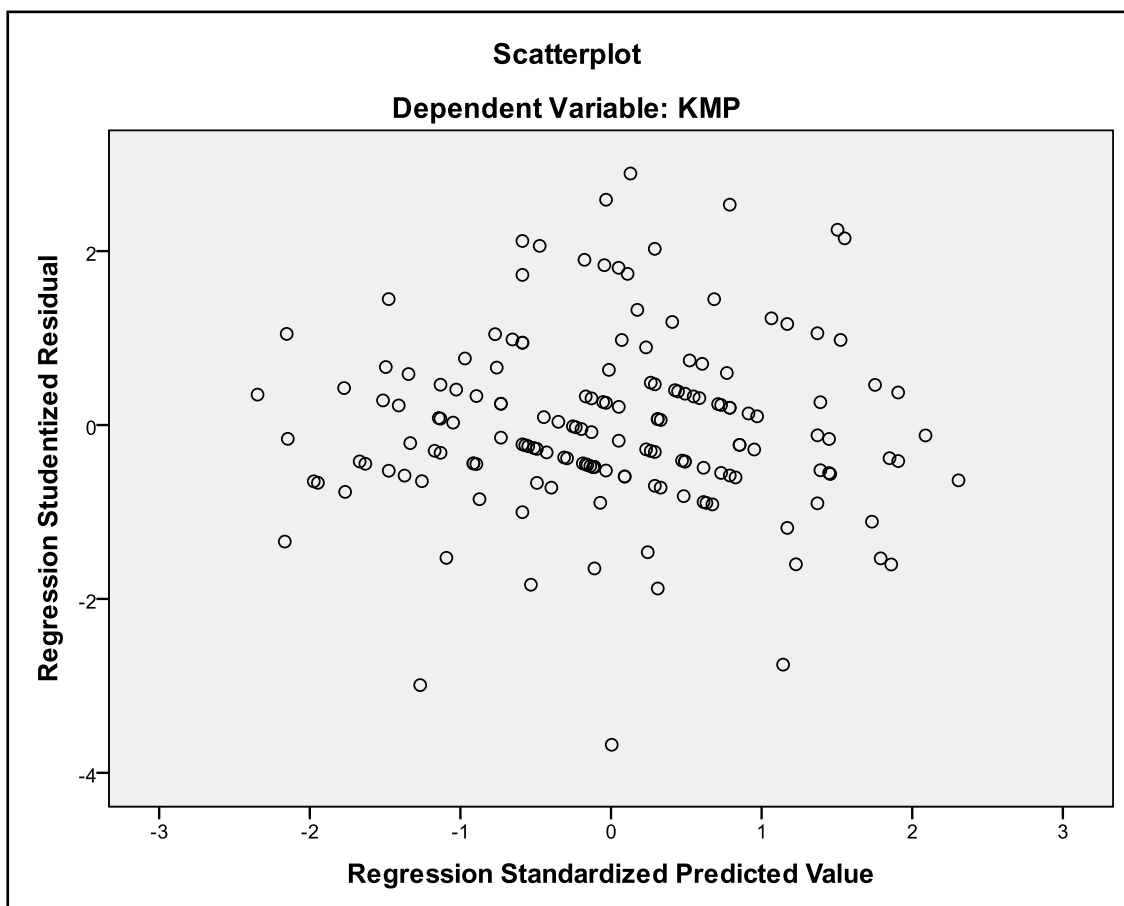
Lampiran 7

P-Plots Uji Normalitas



Lampiran 8

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



RIWAYAT HIDUP



Sonia Dwi Utami, lahir di Jakarta 24 Juni 1992. Anak kedua dari pasangan M Taufiq Hidayat Ali yang berprofesi sebagai pensiunan guru dan Danah Yusdianah sebagai pegawai salah satu BUMN. Memiliki satu orang kakak perempuan Athina Al Yusfi dan adik perempuan

Siti Aura Fitri. Bertempat tinggal di Jalan Casablanca gg swadaya no 20 A RT/RW 004/001 Jakarta Selatan.

Pendidikan formal yang ditempuh, SDN Tebet Barat 05 Pagi (1999-2004); SMPN 265 Jakarta (2004-2007); SMAN 79 Jakarta (2007-2010); Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (2010-2014).

Penulis termasuk orang yang cukup aktif dalam kegiatan kesenian. Keaktifannya sudah dimulai sejak penulis duduk dibangku SD, dimana penulis menjadi bagian dari tim paduan suara, ikut serta dalam perlombaan angklung dan pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ), keaktifan dalam bidang kesenian berlanjut hingga ke tingkat SMA, penulis mengikuti ekstrakurikuler kesenian dalam bidang seni musik. Kemudian dibangku perkuliahan, penulis pernah ikut serta dalam kepanitiaan MPA Jurusan Akuntansi.